

RINGKASAN **EKSEKUTIF****I. GAMBARAN UMUM**

Perkembangan ekonomi triwulan I – 2008 masih menunjukkan *trend* yang cukup baik

- Gejolak Ekonomi Nasional dan internasional, memberikan pengaruh terhadap perekonomian Riau. Namun demikian, perkembangan ekonomi masih menunjukkan trend yang relatif baik dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, meskipun mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, laju inflasi meningkat cukup tinggi, baik sebagai dampak dari meningkatnya harga komoditas internasional maupun adanya bencana (banjir dan longsor).
- Perkembangan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sampai dengan triwulan IV-2007, terdapat 6 (enam) proyek yang telah disetujui dengan nilai investasi sebesar Rp.1.385,4 miliar, yang diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 1.738 orang. Sementara perkembangan

investasi Penanaman Modal Asing (PMA), terdapat 19 (sembilan belas) proyek yang telah disetujui dengan nilai investasi sebesar US\$ 3.592,3 juta dan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 14.797 orang.

Turunnya BI-Rate mulai direspon dengan penurunan suku bunga kredit

- Di sektor perbankan, tingkat suku bunga mulai bergerak turun mengikuti BI Rate yang ditetapkan pada 6 Desember 2007, dan selanjutnya diikuti oleh peningkatan penyaluran kredit. Respon penurunan BI-Rate diperkirakan masih berlanjut pada triwulan II tahun 2008.

II. ASESMEN MAKROEKONOMI REGIONAL

- Kinerja perekonomian Riau pada triwulan I-2008 (y-o-y) mengalami peningkatan sebesar 7,81%. Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan kinerja yang semakin baik bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 7,74%, tetapi mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 8,71%.
- Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada konsumsi pemerintah sebesar 9,78%, sebagai dampak dari meningkatnya belanja barang dan jasa pegawai karena adanya penerimaan CPNS baru pada triwulan laporan. Selanjutnya, komponen impor tumbuh 9,32 komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 8,27%. Sementara itu, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,65%, tetapi tetap mempunyai pangsa terbesar yaitu 51,21%.
- Menurut sektor ekonomi, sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 24,13%, diikuti oleh sektor keuangan, persewaan & bangunan yaitu sebesar 11,53%. Namun demikian pangsa terbesar sektor ekonomi di Riau adalah sektor pertanian yaitu 36,19%, diikuti sektor industri pengolahan sebesar 28,99%. Relatif rendahnya pertumbuhan sektor pertanian perlu mendapat perhatian khusus

Pada triwulan I – 2008 konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan terbesar

Sektor pertanian masih mempunyai pangsa terbesar

mengingat mayoritas penduduk usia kerja di Riau (48,82%) bekerja di sektor pertanian. Selain itu upaya pembangunan sektor listrik, gas dan air bersih perlu segera dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan investasi.

III. ASESMEN INFLASI

- Perkembangan tingkat harga secara umum di Riau pada triwulan I–2008 terus bergerak naik. Inflasi tahunan Riau (*year on year*) per Maret 2008 sebesar 8,02%, lebih rendah bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 9,42%.
- Secara triwulanan, inflasi Riau sebesar 4,14% atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,31%. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan nasional yaitu sebesar 3,41%. Laju inflasi tersebut terutama dipicu oleh bencana longsor dan banjir sehingga mengganggu distribusi barang. Hal ini ditunjukkan oleh cukup tingginya angka inflasi yang berasal dari *volatile food* yang mencapai 5,94% dengan andil 1,48%.
- Tekanan eksternal seperti kenaikan harga minyak, CPO, beras dan harga emas dunia di pasar internasional juga turut menjadi pendorong meningkatnya tekanan inflasi Kota Pekanbaru, yang tercermin dari meningkatnya indeks harga beras, minyak tanah, emas perhiasan, dan minyak goreng. Selain itu, kenaikan harga cengkeh sangat mempengaruhi harga jual rokok, yang didukung juga oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.134/PMK.04/2007 tentang Penetapan Harga Dasar dan tarif Cukai Hasil Tembakau. Kenaikan ini didorong juga oleh meningkatnya biaya produksi, karena kenaikan harga diikuti juga dengan kelangkaan komoditas cengkeh itu sendiri.

Inflasi mencatat *trend* peningkatan dimana *volatile food* mengalami peningkatan tertinggi

IV. ASSES MEN KEUANGAN

Perbankan Riau

Berdasarkan sektor usaha, kredit terbesar berada pada sektor perdagangan

- Pada triwulan laporan, penyaluran kredit perbankan mengalami pertumbuhan sebesar 4,58%, sedangkan dana pihak ketiga mengalami penurunan sebesar 5,90% dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, kredit masih terkonsentrasi pada sektor perdagangan (perdagangan, restoran dan hotel), yang mencapai 21,27% dari total kredit atau mencapai Rp.3,60 triliun. Sebagian besar kredit tersebut yaitu Rp.2,16 triliun (61,51%) merupakan kredit kepada subsektor perdagangan eceran. Penyerapan kredit yang tinggi pada sektor perdagangan terkait dengan peningkatan aktivitas perdagangan di Riau dan searah dengan kebijakan pemerintah daerah untuk menjadikan Riau sebagai pusat perdagangan sesuai dengan visi Riau 2020..

Kredit sektor pertanian mencapai 21,06% dari total kredit perbankan

- Sektor lain yang juga menyerap kredit cukup besar adalah sektor pertanian yaitu sebesar Rp.3,48 triliun atau mencapai 21,06% dari total kredit. Sebagian besar kredit tersebut yaitu Rp.2,90 triliun (83,43%) merupakan kredit kepada sub sektor perkebunan. Tingginya pangsa kredit yang disalurkan pada sub sektor perkebunan terutama dipengaruhi oleh besarnya skala usaha di sub sektor perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit, karet, dan kelapa sehingga mampu menyerap kredit dalam jumlah besar.
- Di sisi lain, subsektor perikanan terus menunjukkan peningkatan. Pada triwulan laporan, kredit kepada sub sektor perikanan mencapai Rp.6,81 miliar, meningkat Rp.181 juta atau 2,73% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan ini seiring dengan adanya pengembangan yang dilakukan Pemerintah Daerah, dinas terkait, dan Bank Indonesia melalui forum KKMB, sehingga komitmen perbankan untuk membiayai sektor ini semakin meningkat.

LDR sampai dengan triwulan I-2008 mencapai 58,20%, sementara NPLs 3,00%

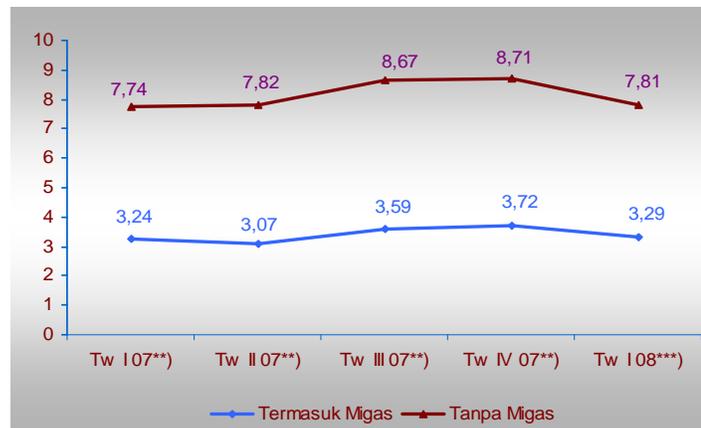
- Posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam triwulan laporan tercatat sebesar Rp.28,38 triliun, menurun sebesar Rp.1,78 triliun (5,90%) dibanding dengan triwulan sebelumnya. Berdasarkan kepemilikan, DPK milik perorangan masih mendominasi dengan pangsa sebesar 61,61% dari total DPK, diikuti milik pemerintah daerah sebesar 21,09%, dan milik perusahaan swasta sebesar 10,70%.
- *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan mengalami peningkatan, yang sampai dengan triwulan I-2008 mencapai 58,20% atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 52,37%, sebagai akibat dari menurunnya dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan.
- Sementara itu, prestasi yang patut dicatat adalah keberhasilan perbankan di Riau dalam menjaga kualitas aktiva produktif. Hal ini terlihat dari cukup rendahnya angka *Non Performing Loans* (NPLs) yang pada triwulan I-2008 yaitu sebesar 3,00% atau jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,41%.
- Kondisi profitabilitas perbankan Provinsi Riau pada triwulan laporan masih terus menunjukkan peningkatan. Penurunan suku bunga kredit yang diimbangi juga dengan penurunan suku bunga dana menyebabkan margin yang diperoleh oleh perbankan mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya

*Bab 1***KONDISI EKONOMI****MAKRO REGIONAL****I. Pertumbuhan PDRB****1. Kondisi Umum**

Memasuki triwulan I-2008, perekonomian Riau menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, baik non migas maupun migas yang masing-masing tercatat sebesar 7,74% dan 3,24%. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Riau mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebagai akibat dari menurunnya produksi migas Riau dan bencana banjir yang melanda hampir seluruh wilayah Riau.

Dalam triwulan laporan, laju pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas sebesar 7,81%, melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 8,71%. Sementara itu, dengan memperhitungkan migas pertumbuhan ekonomi Riau tercatat sebesar 3,29%, juga melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,72%. Pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan I-2008 masih didorong oleh meningkatnya konsumsi, baik rumah tangga maupun pemerintah. Selain itu, peningkatan investasi dan ekspor juga turut memberikan andil bagi pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan laporan.

Grafik 1.1. Perkembangan PDRB Riau (%y-o-y)



Sumber : Diolah oleh Bank Indonesia
 Keterangan : ***) angka sangat sementara
 **) angka sementara

2. PDRB dari Sisi Permintaan

2.1. PDRB Tanpa Migas

Laju pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas pada triwulan I – 2008 mencapai 7,81%, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2007. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen konsumsi pemerintah yaitu sebesar 9,78% yang berasal dari penerimaan gaji pertama CPNS yang baru diangkat pada triwulan I-2008, sehingga belanja barang dan jasa untuk pegawai mengalami peningkatan.

Selanjutnya, pertumbuhan komponen impor mencapai 9,32%, yang didorong oleh adanya peningkatan impor baik antar negara maupun antar daerah seperti impor

barang modal (mesin-mesin pabrik), bahan baku untuk proses produksi (bahan kertas dan pupuk), peralatan listrik, bahan bangunan, bahan makanan, gas elpiji, serta jasa kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, pertumbuhan PMTB mencapai 8,27%, yang diperkirakan karena masih berlanjutnya kegiatan pembangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, pemakaian atau perbaikan mesin-mesin baru, dan penggunaan kendaraan bermotor oleh perusahaan swasta maupun Pemerintah Daerah. Selain itu, pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, pembukaan lahan baru, peremajaan tanaman perkebunan, dan hutan tanaman industri) turut menjadi pendorong pertumbuhan komponen PMTB.

Pertumbuhan konsumsi lembaga swasta nirlaba meningkat sebesar 7,53% yang didorong oleh adanya peningkatan beberapa kegiatan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi sosial lainnya dalam upaya melestarikan lingkungan (misal mengurangi abrasi Sungai Siak). Di samping itu, kegiatan organisasi lainnya dalam membantu masyarakat yang tertimpa musibah dan peningkatan pembangunan sosial budaya di berbagai daerah juga turut mendorong pertumbuhan konsumsi lembaga swasta nirlaba.

Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 5,65%, lebih lambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Terganggunya arus distribusi barang dan jasa akibat bencana banjir/longsor, kelangkaan barang seperti gas elpiji, serta informasi kenaikan gaji PNS menjadi pendorong meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, sayuran, dan gas. Kondisi ini menyebabkan rumah tangga cenderung untuk memperketat pengeluarannya sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat.

Pertumbuhan terendah pada triwulan laporan terjadi pada komponen ekspor yang tercatat sebesar 5,55%. Banjir yang melanda hampir semua wilayah Provinsi Riau sejak akhir tahun 2007 mengakibatkan perlambatan berbagai kegiatan ekonomi Riau. Salah satunya adalah menurunnya produksi dan mutu *Crude Palm Oil* (CPO) karena terganggunya transportasi dan kandungan kadar air yang cukup tinggi pada CPO, sehingga mengakibatkan ekspor CPO yang merupakan komoditas utama menurun.

Tabel 1.1. Pertumbuhan PDRB Riau Tanpa Migas Menurut Penggunaan (%_{y-o-y})

No.	Komponen	Tw I 07**)	Tw II 07**)	Tw III 07**)	Tw IV 07**)	Tw I 08***)
1	Konsumsi Rumah Tangga	7,71	7,56	7,69	5,81	5,65
	a. Makanan	6,59	6,41	6,55	7,13	6,64
	b. Non Makanan	8,30	8,17	8,28	5,12	5,14
2	Konsumsi Lembaga Swasta	10,22	9,13	7,22	6,28	7,53
3	Konsumsi Pemerintah	9,11	8,67	9,64	8,86	9,78
4	PMTB	10,17	8,06	9,03	4,18	8,27
5	Perubahan Stock					
6	Ekspor	6,67	7,47	9,13	-0,11	5,50
	a. Antar Negara	6,66	7,49	9,33	-1,14	5,55
	b. Antar Daerah	6,71	7,30	7,70	7,58	5,11
7	Impor	8,99	9,75	11,32	-4,49	9,32
	a. Antar Negara	5,25	9,25	10,73	-6,25	5,57
	b. Antar Daerah	11,56	10,09	11,73	-3,30	11,74
	Total	7,74	7,82	8,67	8,71	7,81

Sumber : Diolah oleh Bank Indonesia
 Keterangan : ***) angka sangat sementara
 **) angka sementara

Dilihat dari struktur PDRB ekonomi Riau tanpa migas dari sisi penggunaan, komponen konsumsi rumah tangga masih memberikan kontribusi tertinggi yaitu mencapai 51,21%, namun mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 56,78%. Menurunnya kontribusi komponen ini diperkirakan karena tekanan inflasi pada beberapa komoditas utama yang dikonsumsi oleh masyarakat selama triwulan laporan.

Kontribusi komponen ekspor pada triwulan laporan mencapai 37,56%, juga mengalami penurunan bila dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 38,58%. Komoditas ekspor yang masih bergantung pada komoditas CPO, getah karet, kertas dan bubur kertas ini mengalami penurunan produksi karena kondisi alam yang kurang menguntungkan (bencana banjir dan kebakaran hutan). Di sisi lain, kontribusi impor mencapai sebesar 28,11%, atau menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 30,32%. Kondisi ini terkait dengan penurunan impor antar daerah sebagai dampak dari terganggunya distribusi barang dan jasa, serta menurunnya konsumsi rumah tangga.

Selanjutnya komponen PMTB memberikan kontribusi sebesar 18,00%. Penanaman modal baru untuk pembangunan pabrik *Crumb Rubber* di Kabupaten Siak oleh investor dari Malaysia turut mempengaruhi kontribusi PMTB Riau. Selain itu,

kegiatan produksi baru serta pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan) untuk membuka daerah terisolir yang memiliki potensi komoditas unggulan juga berpengaruh signifikan. Kontribusi sebesar itu diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Riau karena komponen PMTB sangat terkait dengan investasi, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta.

Sementara itu, konsumsi pemerintah memberikan kontribusi sebesar 15,47%, walaupun menurun bila dibandingkan dengan dengan triwulan sebelumnya, namun masih memberikan peranan yang cukup tinggi pada perekonomian Riau. Menurunnya kontribusi komponen ini terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan pemotongan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) kepada Provinsi Riau pada APBD 2008, namun demikian penerimaan dari berbagai sumber daya alam yang cukup tinggi masih dapat mengimbangi, sehingga Pemerintah Daerah masih dapat melakukan penyesuaian terhadap gaji dan tunjangan pegawai.

Tabel 1.2. Struktur Komponen Penggunaan Ekonomi Tanpa Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Riau (% ,y-o-y)

No.	Komponen	Tw I 07**)	Tw II 07**)	Tw III 07**)	Tw IV 07**)	Tw I 08***)
1	Konsumsi Rumah Tangga	48,60	47,91	49,50	56,78	51,21
	a. Makanan	16,42	16,62	17,28	20,21	18,23
	b. Non Makanan	32,18	31,29	32,22	36,57	32,97
2	Konsumsi Lembaga Swasta	0,50	0,48	0,49	0,49	0,44
3	Konsumsi Pemerintah	12,28	11,88	13,76	17,08	15,47
4	PMTB	20,41	18,81	19,52	19,44	18,00
5	Perubahan Stock	4,38	5,38	4,72	-2,05	5,44
6	Ekspor	42,11	44,73	42,73	38,58	37,56
	a. Antar Negara	39,33	41,69	39,88	35,78	35,07
	b. Antar Daerah	2,78	3,05	2,85	2,80	2,49
7	Impor	28,27	29,19	30,71	30,32	28,11
	a. Antar Negara	12,21	12,27	12,55	12,40	11,65
	b. Antar Daerah	16,06	16,92	18,17	17,93	16,46
	Total	100	100	100	100	100

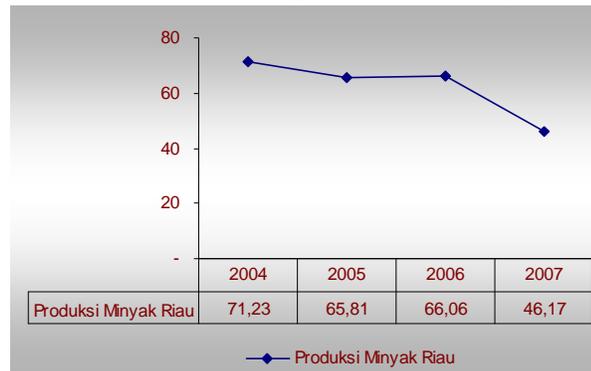
Sumber : Diolah oleh Bank Indonesia
 Keterangan : ***) angka sangat sementara
 **) angka sementara

2.2. PDRB dengan Migas

Laju pertumbuhan ekonomi Riau dengan memasukkan unsur migas tercatat sebesar 3,29%, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan memasukkan unsur migas maka pertumbuhan beberapa komponen mengalami perubahan, karena kontribusi yang dimiliki oleh komponen migas dalam perekonomian Provinsi Riau cukup besar. Komponen yang mengalami perubahan tersebut adalah PMTB, dan komponen ekspor impor.

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan migas tumbuh sebesar 4,43%. Kondisi ini mencerminkan bahwa investor di bidang migas masih tetap ingin menstabilkan atau meningkatkan produksinya guna memenuhi kebutuhan global dan domestik, karena meningkatnya harga migas, yang tercermin dari investasi di bidang migas baik untuk pemeliharaan peralatan maupun upaya untuk pencarian sumur-sumur produksi baru. Sementara itu, pertumbuhan impor mencapai 8,91% yang diperkirakan karena permintaan migas domestik yang relatif masih sangat tinggi untuk pemakain bahan bakar industri, listrik, transportasi, dan rumah tangga, dan pembelian peralatan produksi migas (penggantian dan penambahan).

Grafik 1.2. Produksi Minyak Riau (ribu barel perhari)



Sumber : Dari berbagai sumber

Tabel 1.3. Pertumbuhan PDRB Riau Dengan Migas Menurut Penggunaan (% , y-o-y)

No.	Komponen	Tw I 07**)	Tw II 07**)	Tw III 07**)	Tw IV 07**)	Tw I 08***)
1	Konsumsi Rumah Tangga	7,71	7,56	7,69	5,81	5,65
	a. Makanan	6,59	6,41	6,55	7,13	6,64
	b. Non Makanan	8,30	8,17	8,28	5,12	5,14
2	Konsumsi Lembaga Swasta	10,22	9,13	7,22	6,28	7,53
3	Konsumsi Pemerintah	9,11	8,67	9,64	8,86	9,78
4	PMTB	5,46	5,29	5,81	9,23	4,43
5	Perubahan Stock	-20,02	-31,05	-7,16	-55,04	-10,25
6	Ekspor	4,27	4,91	6,09	9,75	4,62
	a. Antar Negara	4,29	4,97	6,17	9,92	4,64
	b. Antar Daerah	3,87	3,92	4,73	6,86	4,23
7	Impor	8,56	7,51	10,01	12,16	8,91
	a. Antar Negara	4,41	4,28	5,33	7,87	5,47
	b. Antar Daerah	11,72	9,94	13,52	15,34	11,35
	Total	3,24	3,07	3,59	3,72	3,29

Sumber : Diolah oleh Bank Indonesia

Keterangan : ***) angka sangat sementara

**) angka sementara

Dilihat dari struktur PDRB Propinsi Riau dengan migas menurut sisi penggunaan, komponen ekspor memberikan kontribusi tertinggi yaitu mencapai 52,39%. Sedangkan kontribusi komponen impor sebesar 13,42%. Dengan kondisi tersebut kontribusi ekspor *netto* mencapai sebesar 38,97% yang menunjukkan bahwa peran migas di Riau masih sangat dominan. Kecenderungan permintaan migas yang cukup tinggi oleh pasar global diharapkan dapat menjadi pendorong dalam melakukan terobosan untuk kegiatan *ekplorasi* dan *eksploitasi* potensi migas yang diperkirakan masih cukup besar. Namun demikian, komoditas unggulan non migas perlu terus dipacu untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian Riau. Kebijakan dan pelayanan yang mendukung, serta insentif yang menarik sangat diperlukan untuk menarik minat investor di bidang migas maupun non migas agar tetap berproduksi pada skala ekonomis.

Sementara itu, komponen PMTB memberikan kontribusi sebesar 20,62%, kondisi menunjukkan peran kegiatan investasi fisik yang terkait dengan sektor migas masih relatif besar. Besarnya potensi sumber daya alam di Provinsi Riau merupakan salah satu faktor penting dalam menarik minat para investor untuk berinvestasi.

Tabel 1.4. Struktur Komponen Penggunaan Ekonomi dengan Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Riau (%_{y-o-y})

No.	Komponen	Tw I 07**)	Tw II 07**)	Tw III 07**)	Tw IV 07**)	Tw I 08***)
1	Konsumsi Rumah Tangga	27,71	27,72	27,87	28,59	26,39
	a. Makanan	9,36	9,62	9,73	10,42	9,40
	b. Non Makanan	18,34	18,10	18,14	18,17	16,99
2	Konsumsi Lembaga Swasta	0,28	0,28	0,28	0,26	0,22
3	Konsumsi Pemerintah	7,00	6,87	7,75	7,72	7,97
4	PMTB	22,42	22,04	23,35	23,97	20,62
5	Perubahan Stock	5,07	4,51	4,85	2,79	5,83
6	Ekspor	54,80	55,93	54,55	54,77	52,39
	a. Antar Negara	52,43	53,56	52,15	51,87	47,51
	b. Antar Daerah	2,37	2,37	2,39	2,90	4,88
7	Impor	17,28	17,35	18,65	18,10	13,42
	a. Antar Negara	8,09	7,96	7,85	7,79	5,98
	b. Antar Daerah	9,19	9,39	10,80	10,31	7,44
	Total	100	100	100	100	100

Sumber : Diolah oleh Bank Indonesia
 Keterangan : ***) angka sangat sementara
 **) angka sementara

3. PDRB dari Sisi Penawaran

3.1. PDRB Tanpa Migas

Pada triwulan I-2008, sektor pertambangan dan penggalian tanpa migas mengalami pertumbuhan tertinggi yang mencapai 24,13% lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh peningkatan permintaan batu bara untuk memenuhi kebutuhan industri baik di dalam maupun di luar Provinsi Riau.

Sektor keuangan (keuangan, persewaan bangunan & jasa perusahaan) tumbuh sebesar 11,53% yang diperkirakan masih didorong oleh aktivitas perbankan yang semakin mapan dalam menjalankan fungsi intermediasi. Selain itu, perkembangan perekonomian dan pembangunan yang relatif cepat di Riau juga berdampak pada berdirinya jasa penunjang keuangan non perbankan seperti perusahaan sekuritas, lembaga asuransi, koperasi, jasa hukum dan advokasi, jasa akuntansi, serta jasa konsultasi konstruksi.

Selanjutnya, sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami pertumbuhan 9,88%. Pertumbuhan sub sektor komunikasi didorong oleh adanya perang tarif antar *provider*, sehingga memicu pola konsumsi masyarakat terhadap penggunaan pulsa telepon selular. Sementara itu, promosi tarif murah dari beberapa maskapai penerbangan dan banyaknya hari libur nasional menjadi pemicu meningkatnya pertumbuhan sub sektor pengangkutan.

Pertumbuhan sektor bangunan tercatat mencapai 9,22%, yang didukung oleh adanya pembangunan perumahan, ruko, gedung perkantoran, jalan, jembatan, dan bangunan lainnya, serta pembangunan sarana dan prasarana fisik yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menciptakan iklim yang kondusif untuk menarik minat investor berinvestasi di Provinsi Riau.

Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 8,72%, yang utamanya didukung oleh industri kertas dan bubur kertas serta CPO. Selain itu, berkembangnya industri-industri kecil (*garmen*, makanan, dan *furniture*) juga mendukung pertumbuhan sektor industri pengolahan.

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh sebesar 8,58% yang didorong oleh peningkatan pertumbuhan pada semua sub sektor pendukungnya. Meningkatnya transaksi jual beli di Riau dan ditunjang oleh daya beli masyarakat Riau yang relatif stabil (seperti sepeda motor, mobil, barang elektronik, dan handphone) membuat sektor perdagangan di Riau berkembang pesat, terutama di daerah perkotaan.

Pertumbuhan sektor listrik dan air bersih tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhan ini masih relatif kecil dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri, mengingat ketersediaan listrik dan air bersih saat ini masih jauh lebih rendah dari yang dibutuhkan. Hal ini perlu mendapat perhatian karena sektor ini sangat penting dalam mendukung aktivitas sektor lainnya.

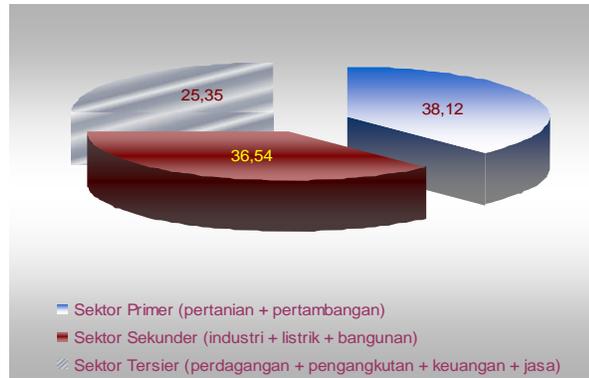
Sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 5,31%, dengan pertumbuhan tertinggi pada subsektor perkebunan dan subsektor peternakan yaitu 8,94% dan 7,59%. Pertumbuhan yang tinggi pada subsektor perkebunan disebabkan adanya peningkatan produksi kelapa sawit, karet, dan kelapa.

Tabel 1.5. Pertumbuhan Ekonomi Riau Sektoral Tanpa Migas (%y-o-y)

No.	Komponen	Tw I 07**)	Tw II 07**)	Tw III 07**)	Tw IV 07**)	Tw I 08***)
1	Pertanian	4,95	5,69	6,12	6,02	5,31
2	Pertambangan dan Penggalian	25,28	21,09	20,83	20,55	24,13
3	Industri Pengolahan	9,52	8,28	9,19	9,03	8,72
4	Listrik dan Air Bersih	4,93	5,26	6,03	6,23	5,45
5	Bangunan	9,28	10,69	11,76	10,92	9,22
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	8,69	8,97	10,39	10,90	8,58
7	Pengangkutan dan Komunikasi	9,19	8,41	8,67	8,80	9,88
8	Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan	11,87	11,95	12,26	13,87	11,53
9	Jasa-jasa	9,04	8,39	10,05	10,20	8,98
PDRB Tanpa Migas		7,74	7,82	8,67	8,71	7,81

Sumber : Diolah oleh Bank Indonesia
 Keterangan : ***) angka sangat sementara
 **) angka sementara

Grafik 1.3. Struktur Ekonomi Riau Sektoral Tanpa Migas (%y-o-y)



Sumber : Diolah oleh Bank Indonesia
 Keterangan : (***) angka sangat sementara
 **) angka sementara

Struktur perekonomian Provinsi Riau pada triwulan laporan masih didominasi oleh sektor primer yaitu sekitar 38,12% terhadap perekonomian Riau. Peranan sektor pertanian mencapai 36,19%, yang didukung oleh sub sektor perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit, karet, kelapa dan sagu, serta sub sektor kehutanan.

Selanjutnya, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 28,99%, peran yang besar pada sektor ini terutama ditopang oleh peran industri kertas dan barang dari kertas, serta industri makanan, minuman dan tembakau. Sementara kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran tercatat sebesar 12,84%, dengan pangsa terbesar pada sub sektor perdagangan. Kebijakan pemerintah daerah untuk menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat perdagangan diperkirakan akan terus mendorong pertumbuhan sub sektor perdagangan baik besar maupun eceran.

Sektor jasa-jasa menunjukkan perkembangan yang baik, dengan kontribusi sebesar 5,81%. Hal ini terutama dihasilkan dari penciptaan nilai tambah khususnya berupa upah/gaji, insentif dan penyusutan barang modal yang relatif meningkat. Sementara itu, sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki kontribusi 3,48% yang didorong oleh meningkatnya sarana transportasi dan komunikasi seperti bertambahnya armada dan penumpang angkutan darat, laut, dan udara serta peningkatan jaringan telepon terutama telepon seluler. Peningkatan sektor ini diharapkan dapat menjadi penunjang sektor ekonomi lainnya dan diharapkan kontribusinya akan terus mengalami peningkatan.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memberikan kontribusi 3,22%. Tumbuhnya jasa penyewaan bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal seperti untuk perkantoran dan usaha, ditambah dengan munculnya bank-bank baru, baik yang konvensional maupun syariah, dan lembaga keuangan lain seperti asuransi telah mendorong perkembangan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan.

Kontribusi terendah pada triwulan I-2008 terjadi pada sektor listrik dan air bersih yaitu 0,34%. Pengelolaan listrik dan air bersih yang belum optimal menjadikan kontribusi sektor ini masih relatif kecil. Pembangunan Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) dan PLTD baru di Riau diharapkan akan dapat meningkatkan peranan sub sektor ini.

Tabel 1.6. Struktur Sektor Ekonomi Tanpa Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Riau (%y-o-y)

No	Komponen	Tw I 07**)	Tw II 07**)	Tw III 07**)	Tw IV 07**)	Tw I 08**)
1	Pertanian	38,64	37,04	36,91	36,94	36,19
2	Pertambangan dan Penggalian	1,45	1,72	1,89	1,76	1,92
3	Industri Pengolahan	30,55	31,65	30,62	28,07	28,99
4	Listrik dan Air Bersih	0,34	0,33	0,33	0,34	0,34
5	Bangunan	4,32	5,40	6,04	7,52	7,22
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,93	11,44	11,84	12,83	12,84
7	Pengangkutan dan Komunikasi	3,28	3,15	3,16	3,58	3,48
8	Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan	3,56	3,46	3,46	3,01	3,22
9	Jasa-jasa	5,93	5,81	5,76	5,95	5,81
Total		100	100	100	100	100

Sumber : Diolah oleh Bank Indonesia
Keterangan : ***) angka sangat sementara
**) angka sementara

3.1. PDRB dengan Migas

Pertumbuhan ekonomi Riau dengan memasukkan unsur migas mengalami perubahan yang cukup signifikan pada 2 sektor yaitu sektor pertambangan (pertambangan dan penggalian) dan sektor industri pengolahan yang masing-masing tumbuh sebesar -0,09% dan 6,46%. Pertumbuhan industri pengolahan utamanya ditopang oleh pertumbuhan industri non migas yaitu sebesar 8,72%, sedangkan industri migas hanya tumbuh 0,05%. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar -0,09% yang disebabkan oleh turunnya produksi migas. Menurunnya produksi migas akan mengganggu pasokan bahan baku

industri migas, khususnya pengalengan minyak di Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis (Sungai Pakning)

Tabel 1.7. Pertumbuhan Ekonomi Riau Sektoral dengan Migas (% ,y-o-y)

No.	Komponen	Tw I 07**)	Tw II 07**)	Tw III 07**)	Tw IV 07**)	Tw I 08***)
1	Pertanian	4,95	5,69	6,12	6,02	5,31
2	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,37	0,18	0,10	-0,09
3	Industri Pengolahan	7,43	6,09	6,83	7,14	6,46
4	Listrik dan Air Bersih	4,93	5,26	6,03	6,23	5,45
5	Bangunan	9,28	10,69	11,76	10,92	9,22
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	8,69	8,97	10,39	10,90	8,58
7	Pengangkutan dan Komunikasi	9,19	8,41	8,67	8,80	9,88
8	Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan	11,87	11,95	12,26	13,87	11,53
9	Jasa-jasa	9,04	8,39	10,05	10,20	8,98
PDRB dengan Migas		3,24	3,07	3,59	3,72	3,29

Sumber : Diolah oleh Bank Indonesia

Keterangan : ***) angka sangat sementara
**) angka sementara

Dilihat dari struktur perekonomian Riau dengan memasukan unsur migas, maka sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 45,23%, dengan didominasi oleh peranan sub sektor pertambangan migas yaitu mencapai 44,19%. Sektor pertanian mempunyai kontribusi terbesar kedua yaitu 19,45% yang didominasi oleh subsektor perkebunan dan kehutanan yang masing-masing mencapai 10,30% dan 5,92%. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 17,64%, sementara itu, sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 6,90%, sektor bangunan sebesar 3,88%, sektor jasa-jasa sebesar 3,12%, pengangkutan dan komunikasi sebesar 1,87%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 1,73%, dan kontribusi terendah diberikan oleh sektor listrik & air bersih yaitu sebesar 0,18%.

Tabel 1.8. Struktur Ekonomi Riau Sektoral dengan Migas (%y-o-y)

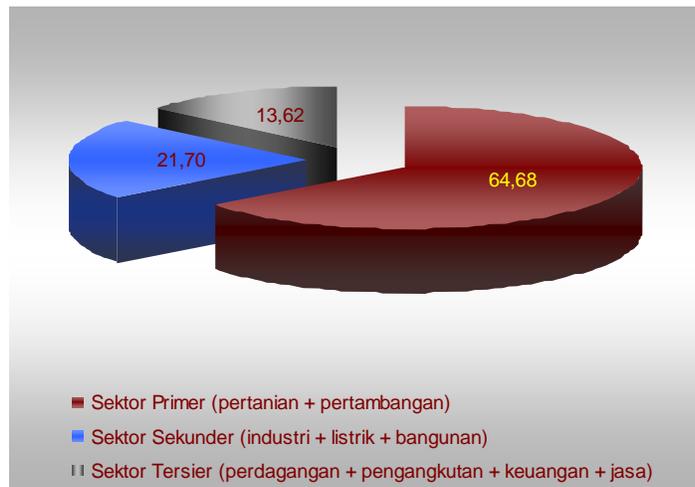
No.	Komponen	Tw I 07**)	Tw II 07**)	Tw III 07**)	Tw IV 07**)	Tw I 08***)
1	Pertanian	22,00	21,43	20,78	19,35	19,45
2	Pertambangan dan Penggalian	42,15	41,33	43,09	46,43	45,23
3	Industri Pengolahan	19,14	20,11	18,91	16,81	17,64
4	Listrik dan Air Bersih	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18
5	Bangunan	2,46	3,13	3,40	3,94	3,88
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	6,79	6,62	6,67	6,72	6,90
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1,87	1,82	1,78	1,87	1,87
8	Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan	2,03	2,00	1,95	1,58	1,73
9	Jasa-jasa	3,37	3,36	3,24	3,12	3,12
Total		100	100	100	100	100

Sumber : Diolah oleh Bank Indonesia

Keterangan : ***) angka sangat sementara
**) angka sementara

Dilihat dari aktifitas ekonomi, sektor primer yang terdiri dari pertanian dan pertambangan memberikan kontribusi hingga 64,68%. Selanjutnya, sektor sekunder yaitu industri, listrik dan bangunan sebesar 21,70%. Sementara sektor tersier yang terdiri dari perdagangan, pengangkutan, keuangan dan jasa hanya memberikan sumbangan sebesar 13,62%.

Grafik 1.4. Struktur Ekonomi Riau Sektoral Dengan Migas Triwulan (% y-o-y)



Sumber : Diolah oleh Bank Indonesia

Keterangan : ***) angka sangat sementara
**) angka sementara

Melihat besarnya peranan sektor-sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Riau, maka diperlukan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pengembangan sektor-sektor prioritas. Dalam upaya mengoptimalkan pembangunan masing-masing sektor diperlukan dukungan ketersediaan infrastruktur (listrik, jalan, jembatan, dll) yang memadai serta mendorong pengembangan industri hilir untuk meningkatkan *value added* (nilai tambah) dan penciptaan lapangan kerja.

II. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)

2.1. Persetujuan dan Realisasi PMDN dan PMA

Perkembangan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sampai dengan triwulan IV 2007, terdapat 6 (enam) proyek yang telah disetujui dengan nilai investasi sebesar Rp.1.385,4 miliar, yang diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 1.738 orang. Sementara itu, realisasi investasi PMDN berdasarkan izin usaha tetap sebanyak 11 (sebelas) proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 3.095,3 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 17.912 orang. Realisasi investasi pada tahun 2007 baik dari nilai investasi maupun jumlah proyek mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi tersebut diperkirakan sebagian besar berasal dari persetujuan investasi pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 20.898,2 miliar.

Tabel 1.9. Perkembangan Persetujuan dan Realisasi Investasi PMDN di Provinsi Riau

Tahun	PERSETUJUAN			REALISASI		
	Investasi (Rp Miliar)	Jumlah Proyek	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (Rp Miliar)	Jumlah Izin Usaha Tetap	Jumlah Tenaga Kerja
2001	5,302.0	12	5,871	387.1	3	1,713
2002	1,606.1	8	7,438	0.0	0	0
2003	1,695.1	8	2,700	160.9	2	584
2004	3,469.4	12	5,707	86.1	2	703
2005 *)	4,579.5	11	3,251	10,230.8	15	22,795
2006	20,898.2	4	3,006	2,501.0	10	13,486
2007 :						
Tw. I	124.4	1	268	1,867.8	3	11,823
Tw. II	181.8	2	1,092	346.2	3	1,775
Tw. III	462.0	1	54	881.3	5	4,314
Tw. IV	617.2	2	324	0.0	0	0
Jumlah	1,385.4	6	1,738	3,095.3	11	17,912

Sumber : BPI Provinsi Riau

*) angka koreksi

Dilihat dari perkembangan nilai investasi PMDN menurut kabupaten/kota, sampai dengan triwulan IV-2007 terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota yang memperoleh persetujuan investasi baru yaitu Pelalawan sebesar Rp.123,7 miliar, Rokan Hilir sebesar Rp.115 miliar dan Dumai sebesar Rp.1.073 miliar, sedangkan yang memperoleh persetujuan perluasan/perubahan proyek terdapat pada 2 (dua) kabupaten/kota yaitu Kampar sebesar Rp. 26,7 miliar dan Pekanbaru sebesar Rp.1 miliar. Sementara yang mengalami alih status terdapat pada kabupaten Pelalawan dengan nilai investasi sebesar Rp.41,4 miliar dan kota Pekanbaru sebesar Rp. 4,6 miliar. (lihat tabel 1.10)

Tabel 1.10. Perkembangan Nilai Investasi PMDN Berdasarkan Surat Persetujuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (S/D Triwulan IV 2007)

No.	Kabupaten/Kota	BARU				PERLUASAN/PERUBAHAN				ALIH STATUS				TOTAL				
		Pry	INV (Miliar Rp)	TNG. KERJA TKI TKA		Pry	INV (Miliar Rp)	TNG. KERJA TKI TKA		Pry	INV (Miliar Rp)	TNG. KERJA TKI TKA		Pry	INV (Miliar Rp)	TENAGA KERJA TKI TKA	Jumlah	
1	Kuantan Singingi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Indragiri Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Indragiri Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pelalawan	1	123.7	504	-	-	-	-	1	41.4	48	-	2	165.1	552	-	552	
5	Siak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Kampar	-	-	-	3	26.7	399	-	-	-	-	-	-	26.7	399	-	399	
7	Rokan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Rokan Hilir	1	115	207	-	-	-	-	-	-	-	-	1	115.0	207	-	207	
10	Pekanbaru	-	-	-	1	1.0	254	-	1	4.6	200	-	1	5.6	454	-	454	
11	Dumai	2	1,073.0	126	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,073.0	126	-	126	
	JUMLAH	4	1,311.7	837	-	4	27.7	653	-	2	46.0	248	-	6	1,385.4	1,738	-	1,738

Sumber : BPI Provinsi Riau

Dilihat dari perkembangan nilai investasi PMDN menurut sektor ekonomi, terdapat 2 (dua) sektor yang merupakan persetujuan investasi baru yaitu industri makanan dan industri kimia. Sedangkan yang memperoleh persetujuan perluasan proyek terdapat pada 3 (tiga) sektor yaitu peternakan, industri makanan dan jasa lainnya. Sementara sektor yang mengalami alih status terdapat pada sektor perkebunan dan jasa lainnya. (lihat tabel 1.11)

Tabel 1.11. Perkembangan Nilai Investasi PMDN Berdasarkan Surat Persetujuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (S/D Triwulan IV 2007)

No.	Sektor	BARU				PERLUASAN/PERUBAHAN				ALIH STATUS				TOTAL				
		Pry	INV (Miliar Rp)	TNG. KERJA TKI	TKA	Pry	INV (Miliar Rp)	TNG. KERJA TKI	TKA	Pry	INV (Miliar Rp)	TNG. KERJA TKI	TKA	Pry	INV (Miliar Rp)	TENAGA KERJA TKI	TKA	Jumlah
1	Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.4	48	-	1	41.4	48	-	48
3	Peternakan	-	-	-	1	9.4	61	-	-	-	-	-	-	9.4	61	-	61	
4	Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pertambangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Industri Makanan	2	238.7	711	-	15.8	286	-	-	-	-	-	-	2	254.5	997	-	997
8	Industri Konveksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Industri Kayu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Industri Kertas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Industri Farmasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Industri Kimia	2	1,073.0	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,073.0	126	-	126
13	Ind. Mineral Logam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ind. Logam Dasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Ind. Barang Logam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Industri Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Listrik dan Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Bangunan/Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Hotel & Restoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pengangkutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Perumahan Kaw. Ind.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Jasa Lainnya	-	-	-	2	2.5	306	-	1	4.6	200	-	1	7.1	506	-	506	
JUMLAH		4	1,311.7	837	0	4	27.7	653	0	2	46.0	248	0	6	1,385.4	1,738	0	1,738

Sumber : BPI Provinsi Riau

Perkembangan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sampai dengan triwulan IV-2007, terdapat 19 (sembilan belas) proyek yang telah disetujui dengan nilai investasi sebesar US\$ 3.592,3 juta dan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 14.797 orang. Sementara itu, realisasi investasi PMA terdapat 10 (sepuluh) proyek yang telah direalisasikan dengan nilai investasi sebesar US\$ 724 juta yang menyerap tenaga kerja sebanyak 2.857 orang. (lihat tabel 1.12)

Tabel 1.12. Perkembangan Persetujuan dan Realisasi Investasi PMA di Provinsi Riau

Tahun	PERSETUJUAN			REALISASI		
	Investasi (US\$ Juta)	Jumlah Proyek	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (US\$ Juta)	Jumlah Izin Usaha Tetap	Jumlah Tenaga Kerja
2001	1,070.7	15	6,371	197.6	3	211
2002 *)	34.2	7	1,638	1.6	2	131
2003 *)	1,032.4	8	1,624	80.2	4	6,264
2004 *)	222.9	12	18,358	512.9	7	4,900
2005 *)	179.7	9	4,142	795.8	8	2,831
2006 *)	1,839.4	35	13,128	585.4	9	12,793
2007 :						
Tw. I	2,013.1	6	10,942	392.4	1	254
Tw. II	130.3	4	685	11.4	2	178
Tw. III	1,402.7	5	2,265	56.8	1	1,441
Tw. IV	46.2	4	905	263.4	6	984
Jumlah	3,592.3	19	14,797	724.0	10	2,857

Sumber : BPI Provinsi Riau

*) angka koreksi

Perkembangan nilai investasi PMA menurut kabupaten/kota, terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang memperoleh persetujuan investasi baru yaitu Indragiri Hulu dengan nilai investasi sebesar US\$ 5 juta, Pelalawan sebesar US\$ 10 juta, Kampar sebesar US\$ 7,5 juta, Pekanbaru sebesar US\$ 3 juta dan Dumai sebesar US\$ 80,3 juta. Sedangkan yang memperoleh persetujuan perluasan proyek terdapat pada 4 (empat) kabupaten/kota yaitu Pelalawan dengan nilai investasi sebesar US\$ 170,6 juta, Siak sebesar US\$ 1.715 juta, Bengkalis sebesar US\$ 67,31 juta dan Dumai sebesar US\$ 95,6 juta. Sementara yang memperoleh persetujuan alih status terdapat pada 4 (empat) kabupaten/kota yaitu Rokan Hulu sebesar US\$ 7,1 juta, Bengkalis sebesar US\$ 11,2, Rokan Hilir sebesar US\$ 83,3 dan Pekanbaru sebesar US\$ 1.336,5 juta. (lihat tabel 1.13)

Tabel.1.13. Perkembangan Nilai Investasi PMA Berdasarkan Surat Persetujuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (S/D Triwulan IV-2007)

No.	Sektor	BARU				PERLUASAN/PERUBAHAN				ALIH STATUS				TOTAL			
		Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA TKI TKA		Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA TKI TKA		Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA TKI TKA		Pry	INV (Juta US\$)	TENAGA KERJA TKI TKA	Jumlah
1	Kuantan Singingi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Indragiri Hulu	1	5.0	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	47	-	47
3	Indragiri Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelalawan	1	10.0	100	-	1	170.6	158	-	-	-	-	-	1	180.6	258	258
5	Siak	-	-	-	-	3	1,715.0	6,150	-	-	-	-	-	-	1,715.0	6,150	6,150
6	Kampar	2	7.5	402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.5	402	402
7	Rokan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.1	189	-	1	7.1	189	189
8	Bengkalis	-	-	-	-	1	67.31	114	-	1	11.2	410	-	1	78.50	524	524
9	Rokan Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	2	83.3	4,596	-	2	83.3	4,596	4,596
10	Pekanbaru	4	3.0	71	-	-	-	-	-	5	1,336.5	2,166	-	9	1,339.5	2,237	2,237
11	Dumai	3	80.3	143	-	3	95.6	251	-	-	-	-	-	3	175.8	394	394
	JUMLAH	11	105.8	763	-	8	2,048.5	6,673	-	9	1,438.1	7,361	-	19	3,592.3	14,797	14,797

Sumber : BPI Provinsi Riau

Perkembangan nilai investasi PMA menurut sektor ekonomi sampai dengan triwulan IV-2007, terdapat 6 (enam) sektor ekonomi yang merupakan persetujuan investasi baru yaitu perkebunan, industri makanan, industri kayu, industri kimia, perdagangan dan jasa lainnya dengan total nilai investasi sebesar US\$ 105,7 juta. Sedangkan yang memperoleh persetujuan perluasan proyek terdapat pada 5 (lima) sektor ekonomi yaitu industri makanan, industri kayu, industri kertas, industri kimia, serta listrik dan air dengan total nilai investasi sebesar US\$ 2.048,5 juta. Sementara yang memperoleh persetujuan alih status terdapat pada 5 (lima) sektor yaitu perkebunan, industri makanan, industri kimia, perdagangan serta jasa lainnya dengan total nilai investasi sebesar US\$ 1.438,1 (lihat tabel 1.14)

Tabel 1.14. Perkembangan Nilai Investasi PMA Berdasarkan Surat Persetujuan Menurut Sektor di Provinsi Riau (S/D Triwulan IV-2007)

No.	Sektor	BARU				PERLUASAN/PERUBAHAN				ALIH STATUS				TOTAL				
		Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA TKI	TKA	Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA TKI	TKA	Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA TKI	TKA	Pry	INV (Juta US\$)	TENAGA KERJA TKI	TKA	Jumlah
1	Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Perkebunan	1	0.3	100	-	-	-	-	-	2	72.6	4,020	-	2	72.8	4,120	-	4,120
3	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pertambangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Industri Makanan	2	15.0	200	-	2	76.7	141	-	2	29.0	1,175	-	4	120.7	1,516	-	1,516
8	Industri Konveksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Industri Kayu	1	2.3	202	-	1	0.2	100	-	-	-	-	-	1	2.5	302	-	302
10	Industri Kertas	-	-	-	-	1	1,174.7	1,050	-	-	-	-	-	-	1,174.7	1,050	-	1,050
11	Industri Farmasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Industri Kimia	2	77.0	113	-	3	767.9	5,362	-	1	1,311.1	2,100	-	3	2,156.0	7,575	-	7,575
13	Ind. Mineral Logam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ind. Logam Dasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Ind. Barang Logam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Industri Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Listrik dan Air	-	-	-	-	1	29.0	20	-	-	-	-	-	-	29.0	20	-	20
18	Bangunan/Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Perdagangan	2	4.5	60	-	-	-	-	-	2	23.9	53	-	4	28.0	113	-	113
20	Hotel & Restoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pengangkutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Perumahan Kaw. Ind.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Jasa Lainnya	3	6.8	88	-	-	-	-	-	2	1.5	13	-	5	8.3	101	-	101
	JUMLAH	11	105.7	763	-	8	2,048.5	6,673	-	9	1,438.1	7,361	-	19	3,592.3	14,797	-	14,797

Sumber : BPI Provinsi Riau

Persetujuan Penanaman Modal Asing (PMA) menurut negara asal yang merupakan persetujuan investasi baru terbesar berasal dari India dengan nilai investasi sebesar US\$ 66,3 juta, sedangkan yang memperoleh persetujuan perluasan/perubahan lahan maupun alih status berasal dari negara Seychel (Afrika) dengan nilai investasi sebesar US\$ 170,6 juta dan US\$ 1.311,1 juta. (lihat tabel 1.15)

Tabel 1.15. Perkembangan Nilai Investasi PMA Berdasarkan Surat Persetujuan Menurut Negara Asal di Provinsi Riau (S/D Triwulan IV 2007)

No.	Negara Asal	BARU				PERLUASAN/PERUBAHAN				ALIH STATUS				TOTAL				
		Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA TKI	TKA	Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA TKI	TKA	Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA TKI	TKA	Pry	INV (Juta US\$)	TENAGA KERJA TKI	TKA	Jumlah
1	Korea Selatan	1	2.5	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.5	302	-	302
2	Singapura	1	0.3	10	-	-	-	-	-	5	112.8	5,034	-	5	113.0	5,044	-	5,044
3	Malaysia	3	25.3	181	-	1	67.3	114	-	1	1.1	15	-	4	93.7	310	-	310
4	India	2	66.3	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	66.3	87	-	87
5	Mauritius	-	-	-	-	1	57.2	204	-	-	-	-	-	-	57.2	204	-	204
6	Seychel	-	-	-	-	1	170.6	158	-	1	1,311.1	2,100	-	1	1,481.7	2,258	-	2,258
7	Inggris	1	5.0	47	-	2	38.3	47	-	2	13.1	212	-	3	56.4	306	-	306
8	Gab. Negara	3	6.5	136	-	3	1,715.0	6,150	-	-	-	-	-	3	1,721.5	6,286	-	6,286
	Jumlah	11	105.7	738	-	8	2,048.5	6,673	-	9	1,438.1	7,361	-	19	3,592.3	14,797	-	14,797

Sumber : BPI Propinsi Riau

3.2. Peringkat realisasi PMDN dan PMA

Dari seluruh provinsi di Indonesia realisasi investasi PMDN dan PMA di provinsi Riau pada periode Januari sampai dengan Desember 2007 telah menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Selama periode tersebut, provinsi

Riau masih menempati urutan ke 4, baik dalam realisasi investasi PMDN maupun PMA. Realisasi investasi PMDN sebanyak 11 proyek dengan nilai realisasi mencapai Rp.3.095,3 miliar, sedangkan realisasi investasi PMA mencapai US\$.724 juta dengan jumlah proyek sebanyak 10 proyek.

Namun demikian, berdasarkan data rencana dan realisasi investasi menunjukkan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir secara rata-rata realisasi dibandingkan dengan rencana investasi baru di provinsi Riau masih relatif kecil yaitu 50,19% untuk PMDN dan 39.30% untuk PMA. Melihat besarnya potensi ekonomi pada beberapa sektor seperti perkebunan, perikanan, industri, dan pertambangan, maka peningkatan realisasi investasi baik PMA maupun PMDN di provinsi Riau masih sangat terbuka. Kondisi ini perlu mendapat perhatian semua pihak untuk mendukung upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif baik dari sisi regulasi maupun ketersediaan infrastruktur.

Tabel 1.16. Peringkat Realisasi Investasi PMA dan PMDN Menurut Lokasi Periode Januari s/d Desember 2007

PMDN					PMA				
NO	LOKASI	Proyek (Jumlah)	NILAI (Rp.Miliar)	%	NO	LOKASI	Proyek (Jumlah)	NILAI (US\$,Juta)	%
1	JAWA BARAT	35	11,347.9	32.5	1	DKI JAKARTA	365	4,676.9	45.2
2	JAMBI	3	4,751.8	13.6	2	JAWA TIMUR	62	1,689.6	16.3
3	DKI JAKARTA	34	4,218.0	12.1	3	JAWA BARAT	244	1,326.9	12.8
4	RIAU	11	3,095.3	8.9	4	RIAU	10	724.0	7.0
5	SULAWESI TENGGARA	1	2,768.9	7.9	5	BANTEN	77	707.9	6.8
6	JAWA TIMUR	17	1,724.7	4.9	6	SUMATERA SELATAN	5	213.8	2.1
7	SUMATERA UTARA	6	1,521.3	4.4	7	SUMATERA UTARA	17	189.7	1.8
8	BANTEN	22	1,068.7	3.1	8	KALIMANTAN TIMUR	17	160.2	1.5
9	SUMATERA SELATAN	5	811.5	2.3	9	LAMPUNG	4	124.5	1.2
10	SULAWESI UTARA	1	624.0	1.8	10	JAWA TENGAH	40	100.7	1.0
11	SULAWESI TENGAH	2	487.6	1.4	11	KALIMANTAN TENGAH	3	77.6	0.7
12	KALIMANTAN TENGAH	2	447.0	1.3	12	SULAWESI SELATAN	8	62.8	0.6
13	KALIMANTAN TIMUR	3	440.0	1.3	13	KALIMANTAN SELATAN	6	59.8	0.6
14	KALIMANTAN SELATAN	4	384.0	1.1	14	SUMATERA BARAT	5	58.7	0.6
15	BANGKA BELITUNG	1	313.7	0.9	15	KEPULAUAN RIAU	28	52.8	0.5
16	KALIMANTAN BARAT	2	287.0	0.8	16	BALI	74	50.4	0.5
17	JAWA TENGAH	4	276.5	0.8	17	JAMBI	1	17.6	0.2
18	LAMPUNG	2	163.8	0.5	18	N. ACEH DARUSSALAM	2	17.4	0.2
19	KEPULAUAN RIAU	2	97.1	0.3	19	KALIMANTAN BARAT	2	11.2	0.1
20	D.I YOGYAKARTA	-	33.1	0.1	20	SULAWESI UTARA	1	9.7	0.1
21	BALI	2	15.7	0.0	21	SULAWESI TENGAH	-	7.1	0.1
22	SULAWESI SELATAN	-	1.1	0.0	22	NUSA TENGGARA BARAT	5	5.9	0.1
23	N. ACEH DARUSSALAM	-	-	0.0	23	PAPUA	2	2.5	0.0
24	SUMATERA BARAT	-	-	0.0	24	D.I YOGYAKARTA	4	1.5	0.0
25	BENGKULU	-	-	0.0	25	NUSA TENGGARA TIMUR	1	0.4	0.0
26	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	0.0	26	BENGKULU	-	-	0.0
27	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	0.0	27	BANGKA BELITUNG	-	-	0.0
28	GORONTALO	-	-	0.0	28	SULAWESI TENGGARA	-	-	0.0
29	MALUKU	-	-	0.0	29	GORONTALO	-	-	0.0
30	MALUKU UTARA	-	-	0.0	30	MALUKU	-	-	0.0
31	PAPUA	-	-	0.0	31	MALUKU UTARA	-	-	0.0
J U M L A H		159	34,878.7	100.0	J U M L A H		983	10,349.6	100.0

Sumber : Website BKPM

III. Perkembangan Ekspor-Impor Non Migas

Kenaikan harga beberapa komoditas ekspor di pasar internasional menjadi faktor utama meningkatnya nilai ekspor non migas Provinsi Riau pada periode laporan (Januari - Februari 2008). Surplus kinerja perdagangan luar negeri meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD 443,73 juta (89,94%) yakni dari USD 493,35 juta menjadi USD 937,08 juta. Nilai ekspor non migas meningkat sebesar USD 471,78 juta (60,05%) dan nilai impor non migas meningkat USD 28,05 juta (9,60%).

Tabel 1.17. Perkembangan Ekspor – Impor Propinsi Riau
Periode Januari - Februari 2007 dan 2008 (juta USD)

	Jan - Feb. 2007	Jan - Feb. 2008	Δ	% Δ
Ekspor	785.65	1,257.43	471.78	60.05
Impor	292.30	320.35	28.05	9.60
Net Ekspor	493.35	937.08	443.73	89.94

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

1. Ekspor Non Migas

Volume ekspor non migas Provinsi Riau pada periode laporan menurun 9.06% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu dari 2.013,21 ribu ton menjadi 1.830,88 ribu ton. Sementara itu, nilai ekspor non migas tercatat sebesar USD 1.257,43 juta atau meningkat 60,05%. Kondisi di atas mencerminkan bahwa peningkatan nilai ekspor lebih disebabkan oleh kenaikan harga komoditas di pasaran dunia.

Tabel 1.18. Nilai Ekspor Komoditas Unggulan Propinsi Riau
Periode Januari - Februari 2007 dan 2008 (juta USD)

No	Kelompok	Jan - Feb 2007	%	Jan - Feb 2008	%	Kenaikan (%)
1	Minyak dan Lemak Nabati	455.63	57.99	769.00	61.16	68.78
2	Pulp dan Kertas	126.16	16.06	156.56	12.45	24.09
3	Kertas, Kertas Karton dan Olahannya	119.59	15.22	164.51	13.08	37.56
4	Olahan Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani	29.34	3.74	124.71	9.92	324.99
5	Buah dan Sayuran	9.22	1.17	8.52	0.68	-7.58
6	Batu bara, kokas & brikets	6.38	0.81	5.81	0.46	-8.98
7	Lainnya	39.33	5.01	28.32	2.25	-28.00
	Total	785.65	100.00	1,257.43	100.00	60.05

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

Volume ekspor kelompok minyak dan lemak nabati pada periode laporan sebesar 839,19 ribu ton atau turun 8,13 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 913,48 ribu ton. Walaupun terjadi penurunan disisi volume, nilai ekspor kelompok minyak dan lemak nabati meningkat dari USD 455,63 juta menjadi USD 769 juta (68,78%). Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga komoditi ini dipasaran internasional. Sementara itu, nilai ekspor olahan minyak dan lemak nabati dan hewani tercatat sebesar USD 124,71 juta atau meningkat 324,99% dari periode sebelumnya yang tercatat sebesar USD 29,34 juta, Jenis olahan minyak dan lemak nabati hewani terbesar yaitu minyak dan lemak nabati/hewani, cuka olahan dan minyak cuka hasil penyulingan.

Tabel 1.19. Volume Ekspor Komoditas Unggulan Propinsi Riau
Periode Januari - Februari 2007 dan 2008 (ribu ton)

No	Kelompok	Jan - Feb 2007	%	Jan - Feb 2008	%	Kenaikan (%)
1	Minyak dan Lemak Nabati	913.48	45.37	839.19	45.84	-8.13
2	Pulp dan Kertas	358.71	17.82	347.50	18.98	-3.13
3	Kertas, Kertas Karton dan Olahannya	169.16	8.40	200.11	10.93	18.29
4	Olahan Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani	61.86	3.07	13.25	0.72	-78.57
5	Buah dan Sayuran	20.26	1.01	13.25	0.72	-34.57
6	Batu bara, kokas & brikets	213.96	10.63	167.35	9.14	-21.78
7	Lainnya	275.79	13.70	250.23	13.67	-9.27
Total		2,013.21	100.00	1,830.88	100.00	-9.06

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

Volume ekspor kelompok kertas, kertas karton dan olahannya pada periode laporan tercatat 200,11 ribu ton atau naik 18,29% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 169,16 ribu ton, sedangkan volume ekspor pulp dan kertas mencapai 347,50 ribu ton atau turun 3,13 % dibandingkan periode sebelumnya sebesar 358,71 ribu ton. Mengingat kedua komoditas tersebut berada pada industri yang sama, maka kondisi di atas mencerminkan adanya pergeseran untuk menciptakan komoditi ekspor yang semula berbentuk barang setengah jadi/mentah menjadi barang jadi, sehingga proses penciptaan nilai tambah (*value added*) terhadap komoditi ekspor unggulan di Riau dapat semakin optimal, dan merupakan salah satu jawaban untuk meningkatkan kinerja ekspor daerah di masa mendatang. Secara total nilai ekspor kedua kelompok tersebut meningkat sebesar 30,65% yakni dari USD 245,75 juta

menjadi USD 321,07 juta. Kondisi ini menunjukkan bahwa permintaan dunia akan komoditi ini masih cukup tinggi.

Nilai ekspor batubara, kokas dan briket pada periode laporan tercatat sebesar USD5,81 juta atau menurun 8,98 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar USD 6,38 juta. Penurunan ini disebabkan curah hujan yang cukup tinggi selama periode laporan sehingga volume ekspor komoditi tersebut menurun sebesar 21,78% dari 213,96 ribu ton menjadi 167,35 ribu ton.

Volume ekspor kelompok buah dan sayuran mencapai 13,25 ribu ton atau menurun 34,57% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 20,26 ribu ton. Kondisi ini mempengaruhi nilai ekspor komoditi tersebut yang menurun sebesar 7,58% dari USD 9,22 juta menjadi USD 8,52 juta.

Negara utama tujuan ekspor non migas Provinsi Riau adalah negara-negara di Asia yakni mencapai USD 1.221,87 juta atau 97, 17 % dari nilai ekspor non migas, sedangkan sisanya tersebar ke negara di Africa, Amerika dan Eropa. Negara-negara di Asia yang menjadi tujuan ekspor non migas Provinsi Riau yakni Singapore dengan total ekspor mencapai USD 844,45 juta (67,16%), diikuti Hongkong dengan nilai ekspor sebesar USD 106,49 juta (8,47%), Malaysia dengan nilai ekspor sebesar USD 44,34 juta (3,53%) dan RRC dengan nilai ekspor sebesar USD 32,06 juta (2,55%).

Tabel 1.20. Ekspor Non Migas Menurut Negara Pembeli
Periode Januari - Februari 2007 dan 2008 (juta USD)

No	Negara	Jan -Feb. 2007	%	Jan -Feb. 2008	%	Kenaikan	
						USD	%
1	Singapore	371.16	47.24	844.45	67.16	473.30	127.52
2	Hongkong	127.47	16.22	106.49	8.47	-20.97	-16.45
3	Malaysia	75.16	9.57	44.34	3.53	-30.82	-41.01
4	RRC	82.14	10.46	32.06	2.55	-50.08	-60.96
5	MEE	10.70	1.36	19.62	1.56	8.92	83.36
6	Italy	1.12	0.14	11.14	0.89	10.02	891.68
7	Lainnya	117.90	15.01	199.31	15.85	81.41	69.05
Total		785.65	100.00	1,257.43	100.00	471.78	60.05

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

2. Impor Non Migas

Kegiatan Impor non migas Provinsi Riau pada periode laporan meningkat 9,60% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu dari USD 292,30 juta menjadi USD 320,35 juta. Peningkatan ini terutama terjadi pada barang modal dan bahan baku penolong, sehingga diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan untuk kegiatan produktif khususnya di sektor industri.

Nilai impor barang modal seperti mesin industri tertentu mencapai USD121,68 Juta, mesin industri dan perlengkapannya sebesar USD 43,62 juta dan mesin pembangkit tenaga sebesar USD 42,91 juta. Jumlah nilai impor ketiga barang modal tersebut mencapai USD 208,21 juta atau meningkat 15,50 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD 180,27 juta. Sementara itu, impor bahan baku penolong seperti pupuk kimia buatan pabrik tercatat sebesar USD 29,27 juta, pulp dan kertas sebesar USD 10,35 juta, serta besi dan baja sebesar USD 9,61 juta. Jumlah nilai ekspor ketiga bahan baku penolong tersebut mencapai USD 49,23 juta atau meningkat 23,14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD 39,98 juta.

Tabel 1.21. Impor Komoditas Unggulan Propinsi Riau
Januari - Februari 2007 dan 2008 (juta USD)

No	Komoditas	Jan - Feb 2007	%	Jan - Feb 2008	%	Kenaikan (%)
1	Mesin Industri Tertentu	135.27	46.28	121.68	37.98	(10.05)
2	Mesin Industri dan Perlengkapannya	42.05	14.39	43.62	13.62	3.72
3	Mesin Pembangkit tenaga	2.95	1.01	42.91	13.40	1,353.66
4	Pupuk Kimia buatan Pabrik	6.67	2.28	29.27	9.14	338.52
5	Pulp dan Kertas	18.48	6.32	10.35	3.23	(43.99)
6	Besi dan Baja	14.83	5.07	9.61	3.00	(35.18)
7	Lainnya	72.05	24.65	62.92	19.64	(12.67)
Total		292.30	100.00	320.35	100.00	9.60

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

Impor Provinsi Riau sebagian besar berasal dari negara-negara di Asia, yaitu Singapura dengan nilai impor mencapai USD 139,92 juta atau 43,68% dari total impor, diikuti Hongkong sebesar USD 57,62 juta (17,99%), RRC sebesar USD

48,82 juta (15,24%), sedangkan sisanya berasal dari Australia, Afrika, Amerika dan Eropa.

Tabel 1.22. Impor Non Migas Menurut Negara Penjual Provinsi Riau
Januari - Februari 2007 dan 2008 (juta USD)

No	Negara	Jan -Feb. 2007	%	Jan -Feb. 2008	%	Kenaikan	
						USD	%
1	Singapura	108.48	37.11	139.92	43.68	31.45	28.99
2	Hongkong	54.86	18.77	57.62	17.99	2.76	5.03
3	Malaysia	22.18	7.59	10.84	3.38	-11.34	-51.13
4	RRC	3.76	1.28	48.82	15.24	45.07	1199.93
5	Australia	29.48	10.08	9.43	2.94	-20.05	-68.01
6	Jerman	0.60	0.20	7.77	2.42	7.17	1199.29
7	Lainnya	72.95	24.96	45.95	14.34	-27.00	-37.01
Total		292.30	100.00	320.35	100.00	28.05	9.60

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

3. Nilai Ekspor Non Migas dan Impor Non Migas Menurut Valuta dan Cara Pembayaran

Berdasarkan jenis valuta yang diperoleh dari kegiatan ekspor non migas, valuta USD merupakan yang terbesar yaitu sebesar USD 774,04 juta atau 98,59%. Tingginya penerimaan dalam valuta USD diperkirakan karena mata uang dimaksud bersifat *hard currencies*, atau dapat digunakan hampir diseluruh negara. Kehadiran mata uang lainnya seperti IDR, EUR, SGD, MYR, CAD, dan GBP mengakomodir kebutuhan transaksi ekspor dari negara masing-masing.

Tabel.1.23. Nilai Ekspor Non Migas Propinsi Riau Menurut Valuta
Dan Cara Pembayaran Januari - Februari 2007 dan 2008 (juta USD)

No.	Valuta	Jan-Feb. 2007	Jan-Feb. 2008	No.	Cara Pembayaran	Jan-Feb. 2007	Jan-Feb. 2008
1	USD	774.04	1,239.72	1	Lainnya	351.90	723.01
2	IDR	4.55	8.65	2	Perhitungan Kemudian	182.79	245.74
3	EUR	3.51	6.90	3	Wesel Inkaso	122.33	171.81
4	Lainnya	3.55	2.16	4	Sight L/C	105.80	62.17
				5	Pembayaran dimuka	14.75	30.95
				6	Konsinyasi	0.00	0.00
				7	Usance L/C	8.08	23.74
		785.65	1,257.43			785.65	1,257.43

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

Untuk pembayaran ekspor non migas lebih banyak digunakan cara Perhitungan Kemudian, yaitu mencapai USD 245,74 juta (19,54%). Cara pembayaran seperti ini lazimnya diterima oleh perusahaan yang memiliki induk perusahaan di luar negeri.

Cara pembayaran lainnya adalah Wesel Inkaso sebesar USD171,81 juta (13,66%), *Sight L/C* sebesar USD 62,17 juta (4,94%), pembayaran dimuka sebesar USD 30,95 juta (2,46%), *Usance L/C* sebesar USD 23,74 juta (1,89%) dan lainnya USD 723,01 juta (57,50%).

Tabel.1.24. Nilai Impor Non Migas Provinsi Riau Menurut Valuta Dan Cara Pembayaran Januari - Februari 2007 dan 2008 (juta USD)

No.	Valuta	Jan-Feb. 2007	Jan-Feb. 2008	No.	Cara Pembayaran	Jan-Feb. 2007	Jan-Feb. 2008
1	USD	283.31	309.78	1	Non L/C	282.12	300.29
2	EUR	6.16	3.96	2	L/C	10.18	20.07
3	MYR	1.23	4.23				
4	SGD	1.60	2.36				
6	Lainnya	0.01	0.02				
		292.30	320.35			292.30	320.35

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

Sementara itu, kebutuhan valuta asing dalam rangka impor non migas propinsi Riau terbesar dalam USD yaitu sebesar USD 309,78 juta (96,92%). Sedangkan cara pembayaran untuk impor non migas pada periode yang sama adalah *Non L/C* yaitu sebesar USD 300.29 juta (93,74%) dan *L/C* hanya sebesar USD 20,07 juta (6,26%). Banyaknya penggunaan cara pembayaran *Non L/C* ini merefleksikan adanya dasar saling percaya dalam transaksi perdagangan internasional disamping praktis dan efisien.

IV. Keuangan Daerah

1. Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2007

Sebagaimana telah dipublikasikan sebelumnya, jumlah anggaran pendapatan Provinsi Riau pada tahun 2007 tercatat sebesar Rp.3,65 triliun, sedangkan anggaran belanja sebesar Rp.4,19 triliun. Namun demikian pada bulan Oktober tahun 2007 telah dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Provinsi Riau.

Dalam APBD-P, anggaran pendapatan mengalami penurunan sebesar 2,18% menjadi Rp.3,57 triliun, karena adanya penurunan pendapatan pada dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak. Di sisi lain, anggaran belanja

meningkat sebesar 4,74% menjadi Rp.4,38 triliun. karena adanya peningkatan yang cukup signifikan pada belanja tidak langsung (15,88%), yang didominasi oleh belanja bantuan sosial.

2. Realisasi APBD Provinsi Riau Tahun 2007

Sesuai dengan laporan realisasi APBD Provinsi Riau tahun 2007, pada tanggal 31 maret 2008, anggaran Rp.3,41 triliun realisasi pendapatan mencapai Rp.3,41 triliun atau 95,69%, sedangkan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.3,73 triliun atau 84,96%. Dengan perkembangan tersebut di atas, maka jumlah defisit anggaran tercatat sebesar Rp.314 miliar.

2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2007

Realisasi anggaran pendapatan tertinggi pada tahun berasal dari komponen pendapatan asli daerah yang mencapai 113,86% dari target yang ditentukan. Komponen pendapatan asli daerah yang paling tinggi persentasenya adalah komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yaitu 165,09% dari jumlah yang ditargetkan, diikuti komponen pajak daerah sebesar 109,12%, dan komponen retribusi 104,34%, sedangkan komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar 101,34%.

Komponen dana perimbangan memperoleh pendapatan sebesar Rp.2.14 triliun miliar, atau mencapai 87,44% dari yang ditargetkan. Pencapaian tertinggi berasal dari komponen dana alokasi umum, yaitu 100% dari yang dianggarkan, sedangkan dana bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar 85,83%.

Tabel. 1.25. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2007 (juta)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)	
		Anggaran setelah perubahan	Realisasi	(RP)	%
PENDAPATAN DAERAH					
1	Pendapatan Asli Daerah	1.104.032	1.257.064	153.032	113,86%
	Pajak Daerah	849.151	926.592	77.442	109,12%
	Retribusi Daerah	34.459	35.953	1.494	104,34%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	108.837	110.299	1.462	101,34%
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	111.586	184.220	72.635	165,09%
2	Dana Perimbangan	2.442.768	2.135.945	(306.823)	87,44%
	Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2.165.109	1.858.286	(306.823)	85,83%
	Dana Alokasi Umum	277.659	277.659	0	100,00%
	Dana Alokasi Khusus	0	0	0	0,00%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	20.000	20.000	0	100,00%
	Hibah	0	0	0	0,00%
	Dana Darurat	0	0	0	0,00%
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0,00%
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0	0,00%
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0,00%
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah	20.000	20.000	0	100,00%
JUMLAH PENDAPATAN		3.566.800	3.413.010	(153.791)	95,69%

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Riau

2.2 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2007

Realisasi tertinggi anggaran belanja tahun 2007 berasal dari belanja tidak yaitu 93,30% dari anggaran belanja, sedangkan belanja langsung hanya mencapai 81,17%. Realisasi tertinggi komponen belanja tidak langsung adalah belanja bagi hasil yang mencapai 99,40%, diikuti oleh komponen belanja bantuan keuangan sebesar 95,93%, belanja pegawai sebesar 93,40% belanja bantuan sosial sebesar 88,73% dan terdapat belanja tidak terduga sebesar 11,78%.

Sementara itu, realisasi tertinggi komponen belanja langsung adalah adalah dana alokasi khusus sebesar 82,82%. Selanjutnya, belanja pegawai mencapai 81,96% dan belanja barang dan jasa sebesar 76,44%.

Tabel. 1.26. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Provinsi Riau Tahun 2007 (juta)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)	
		Anggaran setelah perubahan	Realisasi	(Rp)	%
BELANJA DAERAH					
1	Belanja Tidak Langsung	1.372.640	1.280.726	91.914	93,30%
	Belanja Pegawai	508.058	479.121	28.937	94,30%
	Belanja Bunga	0	0	0	0,00%
	Belanja Subsidi	0	0	0	0,00%
	Belanja Hibah	0	0	0	0,00%
	Belanja Bantuan Sosial	447.831	397.378	50.453	88,73%
	Belanja Bagi Hasil ke pada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	370.101	367.889	2.212	99,40%
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi siau	36.650	35.160	1.490	95,93%
	Belanja Tidak Terduga	10.000	1.178	8.822	11,78%
2	Belanja Langsung	3.013.617	2.446.039	567.578	81,17%
	Belanja Pegawai	474.792	389.134	85.659	81,96%
	Belanja Barang dan Jasa	717.143	548.181	168.963	76,44%
	Dana Alokasi Khusus	1.821.681	1.508.725	312.956	82,82%
JUMLAH BELANJA		4.386.257	3.726.765	659.492	84,96%

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Riau

Dari perkembangan di atas, realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Riau tahun 2007 tercatat sebesar Rp.314 miliar dari anggaran semula yaitu sebesar Rp.819 miliar. Penggunaan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SILPA) mencapai 96,04% dari anggaran semula sebesar Rp.1,11 triliun

Tabel. 1.27. Rincian Anggaran dan Realisasi APBD Riau Tahun 2007 (juta)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)	
		Anggaran setelah perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	1.104.032	1.257.064	153.032	113,86%
2	Dana Perimbangan	2.442.768	2.135.945	(306.823)	87,44%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	20.000	20.000	0	100,00%
JUMLAH PENDAPATAN		3.566.800	3.413.010	(153.791)	95,69%
3	Belanja Tidak Langsung	1.372.640	1.280.726	91.914	93,30%
4	Belanja Langsung	3.013.617	2.446.039	567.578	81,17%
JUMLAH BELANJA		4.386.257	3.726.765	659.492	84,96%
Surplus (Defisit)		(819.457)	(313.755)	(813.283)	38,29%

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Riau

KONSUMSI MASYARAKAT TERHADAP BARANG TAHAN LAMA

Dalam PDRB Riau Triwulan I – 2008, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,65%, dengan rincian konsumsi makanan 6,64% dan non makanan 5,14%. Kondisi ini antara lain mencerminkan daya beli masyarakat di Riau masih relatif tinggi, meskipun terjadi kenaikan harga baik pada barang makanan maupun non makanan.

Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga di Riau (%) (y.o.y)

Komponen	Q1-07	Q2-07	Q3-07	Q4-07	Q1-08
Konsumsi Rumah Tangga	7.71	7.56	7.69	5.81	5.65
a. Makanan	6.59	6.41	6.55	7.13	6.64
b. Non Makanan	8.30	8.17	8.28	5.12	5.14

Sumber BPS Prov.Riau, diolah

Untuk mengetahui trend permintaan masyarakat terhadap barang non makanan, KBI Pekanbaru melakukan survey terhadap permintaan barang tahan lama yaitu elektronik dan sepeda motor. Berdasarkan survey terhadap 2 (dua) pedagang elektronik dan 2 (dua) dealer sepeda motor terbesar di kota Pekanbaru, nilai penjualan elektronik pada triwulan laporan mencapai Rp5,2 miliar atau meningkat 34,12% dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, nilai penjualan pada tahun 2007 meningkat 12,78%, dibandingkan tahun sebelumnya.

Perkembangan Penjualan Barang Elektronik

Uraian	Tahun			
	2005	2006	2007	Maret 08
Nilai Penjualan (miliar Rp)	11.2	13.3	15	5.2
% kenaikan		18.75	12.78	34.12

Sumber : Data dari Toko elektronik, diolah

Sementara itu volume penjualan sepeda motor pada triwulan I – 2008 meningkat 34,57 % dibandingkan triwulan sebelumnya, sedangkan volume penjualan pada tahun 2007 meningkat 22,61% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perkembangan Penjualan Sepeda Motor

Uraian	Tahun			
	2005	2006	2007	Maret 08
Volume Penjualan (unit)	4310	3773	4626	1422
% kenaikan		-12.46	22.61	34.57

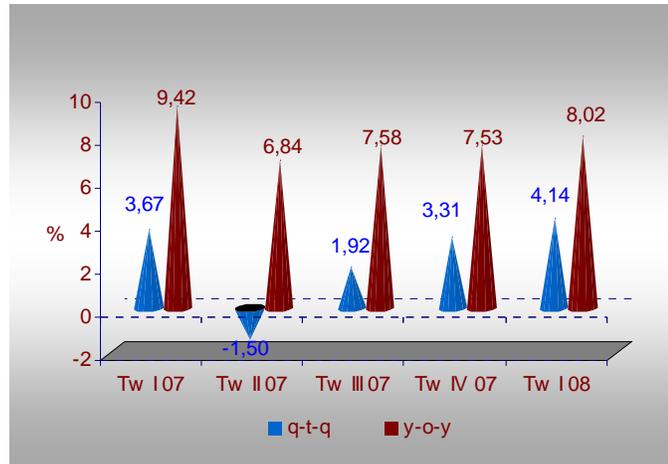
Sumber : Data dari Dealer sepeda motor, diolah

Kondisi di atas menunjukkan bahwa trend permintaan masyarakat terhadap barang tahan lama dalam 2 tahun terakhir terus meningkat. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat di Riau cukup tinggi yang antara lain disebabkan oleh perbaikan struktur gaji, peningkatan upah minimum dan meningkatnya pendapatan masyarakat dari hasil kebun seperti sawit, dan karet. Selain itu, adanya kemudahan-kemudahan dan promosi yang diberikan pihak dealer sepeda motor, dan penjual barang elektronik, serta lembaga pembiayaan non bank turut mendorong peningkatan tersebut.

Dari sisi pembiayaan, untuk pembelian barang elektronik dan sepeda motor masyarakat pada umumnya lebih memilih lembaga pembiayaan non bank dengan pertimbangan utama karena adanya kemudahan dalam persyaratan dan prosedur kredit meskipun suku bunga kredit lebih tinggi dibandingkan kredit dari bank yaitu mencapai 69% dari total nilai penjualan.

Melihat besarnya konsumsi masyarakat terhadap barang tahan lama dan kebutuhan pembiayaan, hal ini merupakan peluang bagi industri perbankan di Riau dalam rangka meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, mengingat potensi kemampuan penyaluran kredit perbankan masih cukup besar.

Grafik 2.1. Perkembangan Inflasi di Kota Pekanbaru



Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Dalam triwulan laporan, inflasi secara bulanan menunjukkan perkembangan yang cenderung menurun. Pada bulan Januari, Februari, dan Maret terjadi inflasi masing-masing sebesar 1,76%, 1,31%, dan 1,03%. Inflasi yang terjadi pada bulan Januari didominasi oleh peningkatan pada kelompok bahan makanan dan kelompok sandang yaitu ikan serai, ikan tongkol, beras, minyak goreng, kelapa, rokok kretek filter, daging ayam ras, minyak tanah dan emas perhiasan. Sementara itu, inflasi pada bulan Februari didominasi oleh kelompok makanan jadi, bahan makanan, rokok kretek filter, kue basah, tahu mentah, emas perhiasan, kue kering minyak, rokok kretek, minyak mentah, beras, dan minyak goreng. Selanjutnya, inflasi pada bulan Maret didominasi oleh peningkatan pada kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi yaitu cabe merah, kue basah, beras, minyak goreng, emas perhiasan, dan bawang merah.

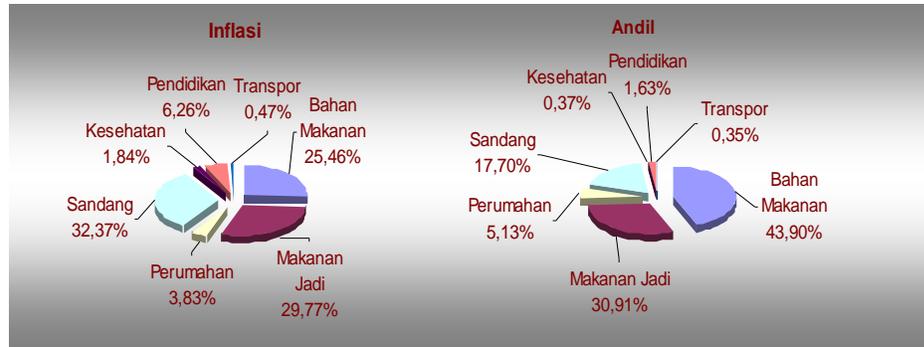
Tabel 2.1. Inflasi dan Andil Inflasi Menurut Kelompok Barang & Jasa
Triwulan I Tahun 2008

NO	KELOMPOK	Jan-08		Feb-08		Mar-08		Tw I 08	
		Inflasi (%)	Andil (%)						
1.	Bahan Makanan	3,20	0,97	0,87	0,26	1,97	0,60	6,15	1,81
2.	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	1,23	0,22	4,96	0,91	0,89	0,16	7,19	1,27
3.	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	0,34	0,08	0,33	0,07	0,25	0,06	0,92	0,21
4.	Sandang	5,17	0,50	0,97	0,09	1,54	0,15	7,82	0,73
5.	Kesehatan	0,40	0,01	0,04	0,00	0,01	0,00	0,44	0,02
6.	Pendidikan, rekreasi, dan olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,07	1,51	0,07
7.	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	0,10	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,11	0,01
UMUM		1,76		1,31		1,03		4,14	

Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Berdasarkan perkembangan tersebut di atas, maka selama triwulan I–2008 terjadi inflasi pada semua kelompok barang dan jasa. Kelompok sandang tercatat mengalami inflasi tertinggi yang mencapai 7,82%, diikuti kelompok makanan jadi sebesar 7,19% dan kelompok bahan makanan sebesar 6,15%, sementara kelompok transpor (transpor, komunikasi dan jasa keuangan) tercatat mengalami inflasi terendah yaitu sebesar 0,11%. Peningkatan laju inflasi Kota Pekanbaru seiring dengan meningkatnya inflasi bahan makanan dan kelompok *volatile foods*, yang disebabkan oleh meningkatnya harga-harga akibat putus jalur transportasi Riau – Sumbar. Putusnya jalur transportasi Riau – Sumbar menyebabkan angkutan barang harus melalui jalur alternatif, sehingga biaya transportasi menjadi lebih mahal.

Grafik 2.2. Inflasi dan Andil Inflasi Menurut Kelompok Barang & Jasa Triwulan I Tahun 2008

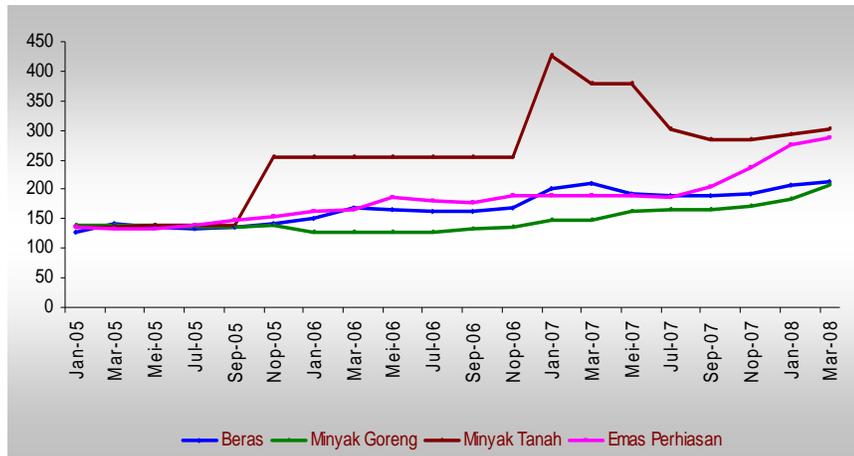


Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Tekanan eksternal seperti kenaikan harga minyak, CPO, beras dan harga emas dunia di pasar internasional juga turut menjadi pendorong meningkatnya tekanan inflasi Kota Pekanbaru, yang tercermin dari meningkatnya indeks harga beras (5,71%), minyak tanah (6,66%), emas perhiasan (17,18%), dan minyak goreng (19,91%). Selain itu, kenaikan harga cengkeh sangat mempengaruhi harga jual rokok dan didukung juga oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.134/PMK.04/2007 tentang Penetapan Harga Dasar dan tarif Cukai Hasil Tembakau. Kenaikan ini didorong juga oleh meningkatnya biaya produksi, karena kenaikan harga cengkeh juga diikuti dengan kelangkaan komoditas cengkeh itu sendiri.

Dilihat dari kontribusi terhadap pembentukan inflasi kota Pekanbaru, kelompok bahan makanan memberikan kontribusi terbesar yang mencapai 1,81%, diikuti oleh kelompok makanan jadi (makanan jadi, minuman, rokok & tembakau) dan kelompok sandang yang masing-masing tercatat sebesar 1,27% dan 0,73%. Tingginya tingkat inflasi pada kelompok bahan makanan lebih disebabkan oleh faktor *shock* berupa kelancaran pasokan dan distribusi. Tingginya tingkat ketergantungan Provinsi Riau terhadap beberapa daerah di luar Riau dan belum baiknya kondisi infrastruktur jalan, turut menyebabkan rentannya harga barang-barang terhadap *shock*.

Grafik 2.3. Inflasi Beberapa Komoditas Penyumbang Inflasi di Kota Pekanbaru



Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Dari grafik di atas, terlihat bahwa indeks harga komoditas beras, minyak goreng, emas perhiasan, dan minyak tanah cenderung terus mengalami peningkatan. Peningkatan indeks minyak tanah lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga beras maupun minyak goreng. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM pada bulan Oktober 2005 masih belum pulih seutuhnya, yang tercermin dari harga minyak tanah yang masih fluktuatif.

Secara nasional, komoditas yang memberikan sumbangan terbesar adalah minyak tanah, minyak goreng, cabe merah, emas perhiasan, tahu mentah, dan beras. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan harga komoditas tersebut bukan hanya menjadi permasalahan di Riau, tapi juga menjadi permasalahan nasional, karena kenaikan tersebut disebabkan adanya tekanan dari eksternal.

Sementara itu, sepuluh komoditas yang mengalami laju inflasi tertinggi selama triwulan I – 2008 adalah tauch, tahu mentah, kue basah, tenggiri, terong panjang, kue kering berminyak, serai, bola lampu, tongkol, dan kelapa. Namun jika dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan inflasi, maka komoditas emas perhiasan, rokok kretek filter, beras, kue basah, minyak goreng, tongkol,

cabe merah, serai, kue kering berminyak, dan tahu mentah memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan inflasi di kota Pekanbaru.

Tabel 2.2. Perkembangan Komoditas yang Mengalami Inflasi dan Kontribusi Tertinggi Selama Triwulan I Tahun 2008

Triwulan I 2008					
No.	Komoditas	Inflasi (%)	No.	Komoditas	Kontribusi (%)
1	Taucho	50,00	1	Emas Perhiasan	0,68
2	Tahu Mentah	45,99	2	Rokok Kretek Filter	0,55
3	Kue Basah	42,86	3	Beras	0,36
4	Tenggiri	34,12	4	Kue Basah	0,33
5	Terong Panjang	33,33	5	Minyak Goreng	0,29
6	Kue Kering Berminyak	28,55	6	Tongkol	0,23
7	Serai	25,30	7	Cabe Merah	0,19
8	Bola Lampu	25,01	8	Serai	0,18
9	Tongkol	23,37	9	Kue Kering Berminyak	0,13
10	Kelapa	21,28	10	Tahu Mentah	0,13

Sumber : BPS Propinsi, diolah

Di sisi lain, terdapat juga beberapa komoditas yang mengalami deflasi (penurunan harga). Sepuluh komoditas yang mengalami deflasi tertinggi adalah angka muda, petai, bawang merah, kentang, semen, cabe hijau, ketimun, daun bawang, tomat sayur, dan pir. Namun, jika dilihat dari kontribusinya dalam pembentukan deflasi, maka komoditas kangkung, cabe hijau, bayam, semen, jeruk, angka muda, petai, tomat sayur, kentang, dan bawang merah memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan besarnya deflasi yang dialami oleh Kota Pekanbaru.

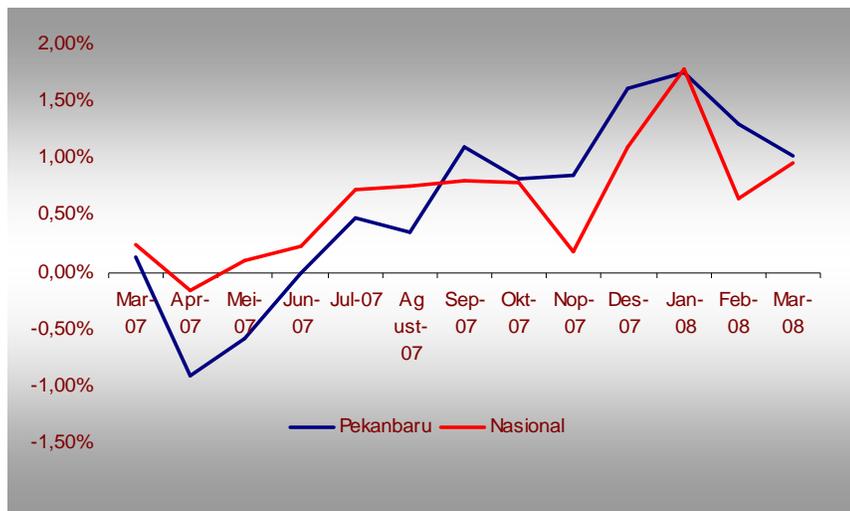
Tabel 2.3. Perkembangan Komoditas yang Mengalami Deflasi dan Kontribusi Tertinggi Selama Triwulan I Tahun 2008

Triwulan I 2008					
No.	Komoditas	Deflasi (%)	No.	Komoditas	Kontribusi (%)
1	Nangka Muda	-39,63	1	Kangkung	-0,01
2	Petai	-25,00	2	Cabe Hijau	-0,01
3	Bawang Merah	-24,21	3	Bayam	-0,01
4	Kentang	-19,40	4	Semen	-0,02
5	Semen	-19,27	5	Jeruk	-0,02
6	Cabe Hijau	-19,03	6	Nangka Muda	-0,02
7	Ketimun	-13,45	7	Petai	-0,02
8	Daun Bawang	-9,13	8	Tomat Sayur	-0,02
9	Tomat Sayur	-7,00	9	Kentang	-0,09
10	Pir	-6,74	10	Bawang Merah	-0,19

Sumber : BPS Propinsi, diolah

Sejak Maret 2007 sampai dengan Agustus 2007 inflasi kota Pekanbaru cenderung lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional, namun sejak September 2007 sampai dengan Maret 2008 inflasi kota Pekanbaru cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional (m-t-m), seperti terlihat pada grafik 2.4. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan harga di Pekanbaru cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perubahan harga di daerah lain dan memberikan sumbangan lebih besar dalam pembentukan inflasi nasional. Kondisi ini sangat terkait dengan tingginya inflasi pada bahan makanan.

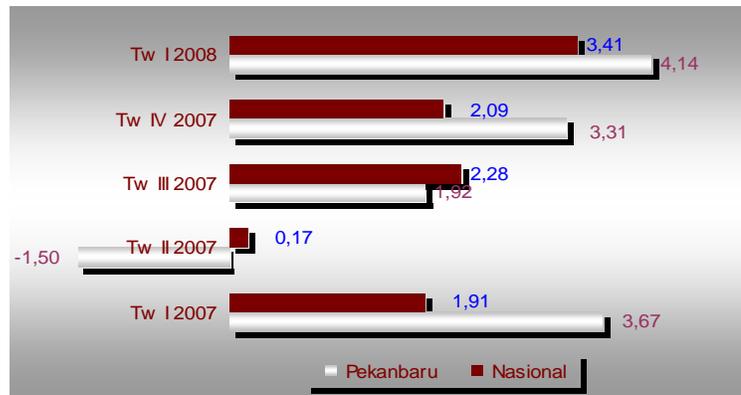
Grafik 2.4. Perkembangan Inflasi di Kota Pekanbaru dan Nasional secara Bulanan



Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Penyumbang utama inflasi nasional pada bulan Januari adalah minyak tanah (0,35%), beras (0,27%), tempe (0,16%), tahu mentah dan emas perhiasan (0,13%), dan minyak goreng (0,07%). Pada bulan Februari, komoditas yang menjadi penyumbang utama adalah cabe merah (0,16%), minyak goreng (0,08%), daging ayam ras (0,04%), kontrak rumah (0,04%), tempe, cabe rawit dan tahu mentah (0,04%), dan emas perhiasan (0,03%). Sementara itu, pada bulan Maret komoditas minyak goreng (0,14%), minyak tanah (0,13%), cabe merah (0,10%), bawang merah (0,06%), emas perhiasan (0,06%), telur ayam ras (0,06%), dan cabe rawit (0,05%) memberikan andil terbesar dalam pembentukan inflasi nasional.

Grafik 2.5. Inflasi kota Pekanbaru dan Nasional



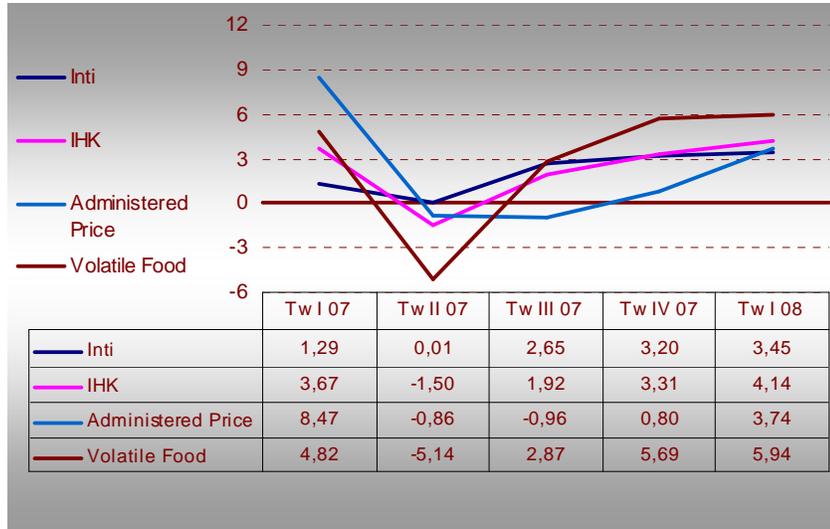
Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Secara triwulanan (q-t-q) laju inflasi Pekanbaru pada triwulan laporan lebih tinggi dibandingkan dengan nasional, kondisi ini sudah berlangsung sejak triwulan IV 2007. Laju inflasi nasional dan kota Pekanbaru secara triwulanan ditunjukkan oleh grafik 2.5.

3. PERKEMBANGAN KOMPONEN-KOMPONEN INFLASI DI KOTA PEKANBARU

Pada triwulan laporan, perkembangan inflasi inti menunjukkan kecenderungan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya maupun triwulan yang sama tahun sebelumnya. Tingginya permintaan barang dan jasa di awal tahun menjadi penyebab meningkatnya inflasi inti (*core inflation*) pada triwulan laporan menjadi sebesar 3,45%, dan memberikan andil sebesar 1,86% terhadap pembentukan inflasi. Barang dan jasa komponen inflasi inti yang mengalami inflasi antara lain adalah taucho (50%), kue basah (42,86%), kue kering berminyak (28,55%), serai (25,30%), bola lampu (25,01%), kelapa (21,28%), nanas (19,78%), dan emas perhiasan (17,18%)

Grafik 2.6. Perkembangan Komponen-Komponen Inflasi



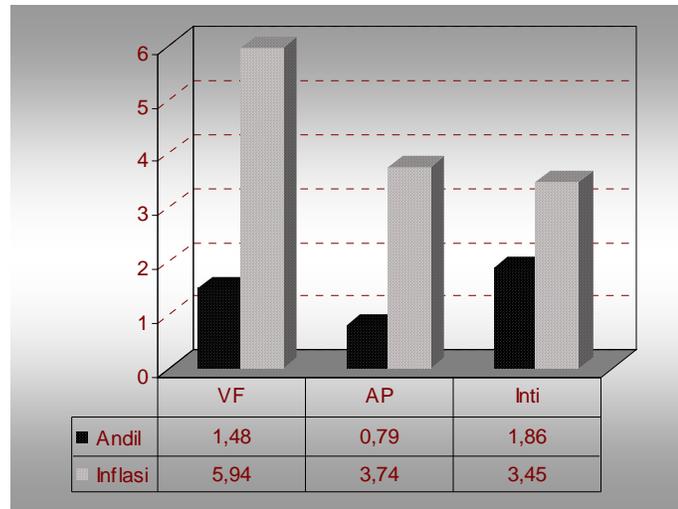
Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Sementara itu, meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan, meningkatkan laju inflasi pada komponen *volatile foods* dari 5,69% menjadi 5,94% dan memberikan kontribusi terhadap inflasi sebesar 1,48%. Terganggunnya jalur transportasi Riau – Sumbar akibat longsor yang terjadi di Nagari Manggilang menjadi penyebab utama peningkatan inflasi *volatile foods* pada triwulan I - 2008. Tingginya tingkat ketergantungan Provinsi Riau terhadap daerah lain, yang disertai juga oleh infrastruktur yang belum memadai menyebabkan rentannya harga-harga terhadap *shock*. Komoditas pada beberapa komponen *volatile food* mengalami peningkatan yang signifikan, seperti tahu mentah (45,99%), tenggiri (34,12%), terong panjang (33,33%), tongkol (23,36%), dan minyak goreng (19,91%).

Pada triwulan laporan inflasi pada kelompok *administered price* mengalami inflasi sebesar 3,74% dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,79%. Barang dan komponen *administired price* yang mengalami inflasi adalah rokok kretek filter (14,19%), minyak tanah (6,67%), rokok kretek filter (4,71%), dan rokok putih (3,23%). Kenaikan harga cengkeh yang mencapai Rp.60 ribu per kilogram dan dibarengi oleh langkanya komoditas cengkeh sangat mempengaruhi harga jual

rokok. Produsen pada akhirnya menaikkan harga jual rokok sejak awal tahun, karena biaya produksi yang bertambah. Namun demikian naiknya harga rokok tidak mengurangi daya beli masyarakat, karena konsumsi masyarakat terhadap rokok belum mengalami penurunan.

Grafik 2.7. Disagregasi Inflasi di Kota Pekanbaru Triwulan I - 2008



Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, kredit terkonsentrasi pada sektor perdagangan (perdagangan, restoran dan hotel) yang mencapai 21,27% dari total kredit atau mencapai Rp.3,51 triliun. Sebagian besar kredit tersebut yaitu Rp.2,16 triliun (61,51%) merupakan kredit kepada subsektor perdagangan eceran. Penyerapan kredit yang tinggi pada sektor perdagangan terkait dengan peningkatan aktivitas ekonomi di Riau dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah untuk menjadikann Provinsi Riau sebagai pusat perdagangan pada tahun 2020.

Sektor lain yang juga menyerap kredit cukup besar adalah sektor pertanian yaitu sebesar Rp.3,48 triliun atau mencapai 21,06% dari total kredit. Sebagian besar kredit tersebut yaitu Rp.2,90 triliun (83,43%) merupakan kredit kepada subsektor perkebunan. Tingginya pangsa kredit yang disalurkan pada sub sektor perkebunan terkait dengan besarnya skala usaha di sub sektor ini seperti perkebunan kelapa sawit, karet, dan kelapa baik untuk kebutuhan pembukaan kebun baru maupun peremajaan (*replanting*). Pengembangan sub sektor perkebunan akan memberikan pengaruh besar dalam upaya peningkatan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan, karena masyarakat yang bekerja di sub sektor ini cukup besar.

Selanjutnya, sub sektor perikanan terus menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada triwulan laporan, kredit kepada subsektor perikanan mancapai Rp.6,81 miliar, meningkat Rp.181 juta atau 2,73% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan ini seiring dengan upaya pengembangan yang dilakukan Pemerintah daerah, dinas terkait, dan Bank Indonesia melalui forum KKMB, sehingga komitmen dan keyakinan perbankan untuk membiayai sektor ini meningkat.

Sementara itu, kredit kepada sektor industri tercatat sebesar Rp.1,62 triliun atau 9,80%, dan kredit kepada sektor lain-lain tercatat sebesar Rp.5,62 triliun atau 34,03% dari total kredit. Kredit pada sektor lain-lain tersebut termasuk kredit perumahan yang tercatat Rp.2,44 triliun. Kredit kepada sektor jasa mencapai Rp.1,21 triliun atau 7,36% dari total kredit dan kredit sektor konstruksi tercatat sebesar Rp.598 miliar atau 3,62% dari total kredit. Jumlah kredit di sektor konstruksi relatif kecil bila dibandingkan dengan perkembangan properti di Provinsi Riau, sehingga ditengarai masih cukup banyak *developer* yang menggunakan *self financing* untuk membiayai proyeknya.

Tabel 3.5. Pangsa Kredit Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Riau (juta rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07	Tw IV 07	Tw I 08
1	Pertanian	3.466.878	3.253.308	3.125.330	3.248.012	3.478.170
2	Pertambangan	1.305	20.129	53.557	71.996	74.860
3	Perindustrian	1.740.767	1.727.481	1.641.003	1.585.252	1.617.809
4	Listrik, Gas dan Air	305	443	6.427	6.422	6.283
5	Konstruksi	504.644	563.100	737.319	603.843	598.228
6	Perdag., Resto. & Hotel	2.771.654	3.042.450	3.256.886	3.510.595	3.513.244
7	Pengangkutan, Pergud.	216.115	228.580	322.346	353.024	392.989
8	Jasa-jasa Dunia Usaha	889.009	959.879	986.694	1.071.764	1.100.477
9	Jasa-jasa Sosial Masy.	129.868	120.332	117.785	109.778	114.409
10	Lain-lain	4.281.890	4.652.509	5.008.474	5.232.863	5.619.773

Dilihat dari penyebaran kredit di kota/kabupaten, kredit yang disalurkan oleh perbankan masih terkonsentrasi di kota Pekanbaru. Posisi kredit yang disalurkan oleh perbankan di kota ini sampai akhir periode laporan tercatat sebesar Rp.12,08 triliun (73,14%). Kondisi tersebut merupakan sesuatu yang wajar mengingat kota Pekanbaru adalah ibukota provinsi, sehingga disamping berfungsi sebagai pusat pemerintahan, juga menjadi pusat bisnis utama baik perbankan maupun non perbankan yang tumbuh cukup pesat di era otonomi daerah.

Sementara itu, jumlah kredit berdasarkan lokasi proyek mencapai Rp.25,50 triliun, meningkat 1,18% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Posisi kredit berdasarkan lokasi proyek lebih besar dibandingkan dengan posisi kredit berdasarkan lokasi bank yang berarti sebagian kegiatan usaha di Riau yaitu sebesar Rp.8,98 triliun dibiayai oleh perbankan di luar Provinsi Riau. Hal ini terkait dengan kewenangan memutus kredit oleh masing-masing bank di Riau, tetapi bukan merupakan masalah bagi bank untuk membiayai sektor ekonomi potensial di Riau. Kredit berdasarkan lokasi proyek pada triwulan laporan mengalami peningkatan hampir di semua kota/kabupaten, kecuali Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai. Peningkatan tertinggi terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir yang mencapai 2,79% diikuti Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 0,52% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, Kabupaten Bengkalis dan Dumai mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,43% dan 2,32% menjadi Rp.2,48 triliun dan Rp.1,12 triliun.

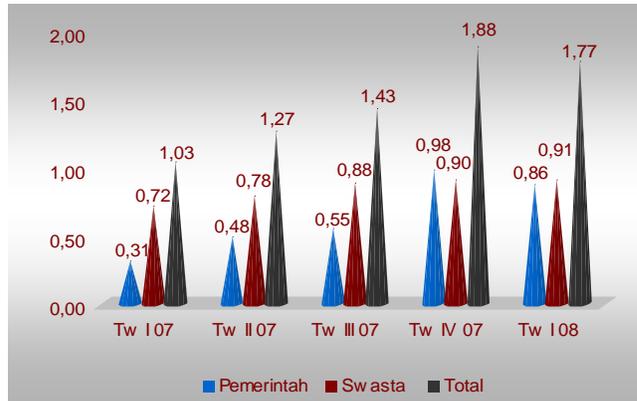
Tabel 3.6. Distribusi Penyaluran Kredit Per Dati II di Provinsi Riau (juta rupiah)

No	Kab./Kota	Lokasi Bank				Lokasi Proyek di Riau			
		Tw II 07	Tw III 07	Tw IV 07	Tw I 08	Tw II 07	Tw III 07	Tw IV 07	Tw I 08*)
1	Pekanbaru	10.737.120	11.084.192	11.571.146	12.079.673	11.403.294	11.990.500	12.302.891	12.394.318
2	Bengkalis	421.201	428.530	449.173	457.065	1.366.591	1.680.422	2.570.329	2.482.293
3	Dumai	609.053	695.663	692.713	713.943	822.670	997.475	1.145.017	1.118.502
4	Indragiri Hilir	742.532	769.665	774.711	788.062	1.237.341	1.272.400	1.598.691	1.643.296
5	Indragiri Hulu	653.873	718.859	737.520	769.630	1.791.158	1.608.145	1.288.617	1.295.277
6	Lainnya	1.404.432	1.558.912	1.568.286	1.707.869	5.413.438	3.829.331	6.295.508	6.564.947
Jumlah		14.568.211	15.255.821	15.793.549	16.516.242	22.034.492	21.378.273	25.201.053	25.498.633

3.1.3.3. Undisbursed Loan dan Persetujuan Kredit Baru

Jumlah *undisbursed loan* (kredit yang belum ditarik) pada triwulan laporan menunjukkan penurunan dari Rp.1,88 triliun menjadi Rp.1,77 triliun atau menurun sebesar 5,70%. Dari jumlah tersebut, sebesar 51,17% tercatat pada kelompok bank swasta, dan 48,83% terdapat pada kelompok bank pemerintah.

Grafik 3.4. Jumlah *Undisbursed Loan* Perbankan Provinsi Riau (triliun rupiah)



Berdasarkan jenis penggunaan, 90,15% dari total kredit yang belum ditarik merupakan kredit modal kerja, sementara kredit investasi dan konsumsi masing-masing sebesar 9,34% dan 0,51%. Sementara itu, berdasarkan sektor ekonomi 37,66% dari kredit yang belum ditarik merupakan kredit kepada sektor perdagangan. Sektor lain yang juga mempunyai kelonggaran tarik cukup besar adalah sektor pertanian, industri, jasa, dan konstruksi yang masing-masing tercatat sebesar 17,58%, 17,15%, 13,31%, dan 0,92%.

Tingginya *Undisbursed Loan* disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tersedianya pembiayaan di luar perbankan (*self financing* dan lembaga keuangan lainnya), suku bunga kredit yang masih relatif tinggi, dan kegiatan/proyek yang

direncanakan belum berjalan sesuai rencana seperti *replanting* di sektor perkebunan.

Persetujuan kredit baru pada triwulan laporan mencapai Rp.2,66 triliun, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, dan didominasi oleh kredit konsumsi yaitu 41,71% dari total persetujuan kredit baru, diikuti kredit modal kerja sebesar 36,36% dan investasi 21,94%. Persetujuan kredit konsumsi meningkat sebesar 28,39% dari Rp.865 miliar pada triwulan IV-2007 menjadi Rp.1,11 triliun pada triwulan laporan dan pangsanya meningkat dari 32,62% menjadi 41,71%. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius, karena hal tersebut akan meningkatkan daya beli masyarakat dan akan berpengaruh signifikan terhadap inflasi.

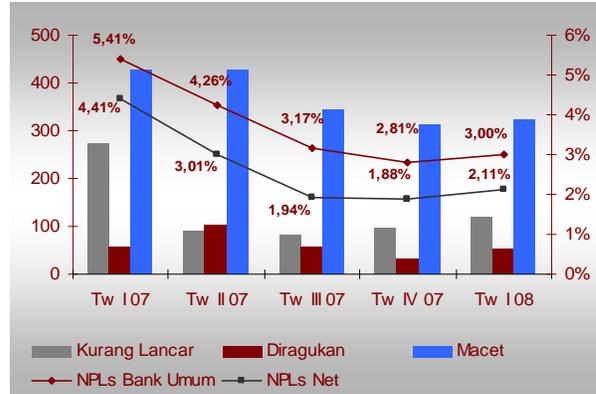
Tabel 3.7. Persetujuan Kredit Baru di Provinsi Riau

Jenis Penggunaan	Tw I 07		Tw II 07		Tw III 07		Tw IV 07		Tw I 08	
	Rp. Juta	%								
1. Modal Kerja	615.992	33,56	731.207	35,13	908.572	38,73	890.869	33,59	968.319	36,36
2. Investasi	422.917	23,04	465.041	22,34	511.133	21,79	896.015	33,79	584.219	21,94
3. Konsumsi	796.350	43,39	885.329	42,53	926.060	39,48	865.150	32,62	1.110.768	41,71
Jumlah	1.835.259	100	2.081.577	100	2.345.765	100	2.652.034	100	2.663.306	100

3.1.3.4. Kualitas Kredit

Kualitas kredit menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercermin dari meningkatnya rasio *Non Performing Loans* (NPLs) dari 2,81% menjadi 3,00%, namun mengalami perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,41%. Bila pembentukan pencadangan aktiva produktif diperhitungkan dalam rasio NPLs, maka rasio NPLs *net* perbankan pada triwulan laporan tercatat sebesar 2,11%, juga lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,88%, namun juga mengalami perbaikan bila dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,41%.

Grafik 3.5. Perkembangan NPLs Gross di Provinsi Riau



Berdasarkan sektor yang dibiayai, sektor jasa-jasa sosial mempunyai NPLs tertinggi yang mencapai 10,22%, tetapi mengalami perbaikan kualitas dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 10,40%, diikuti sektor konstruksi sebesar 5,46%, dan juga mengalami perbaikan kualitas dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selanjutnya, sektor jasa-jasa dunia usaha sebesar 4,34%, sektor perdagangan sebesar 3,75%, sektor pertanian sebesar 3,43%, pereindustrian sebesar 2,51%, konstruksi sebesar 1,08%, dan pengangkutan sebesar 0,88%. Sementara itu, NPLs terendah berada sektor pertambangan, yaitu sebesar 0,00%, mengalami perbaikan yang cukup signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 10,19%. Namun demikian, kualitas kredit pada sektor pertambangan tidak terlalu mempengaruhi kualitas kredit secara keseluruhan, mengingat pangsa kredit pada sektor pertambangan relatif kecil yaitu 0,45%.

Tabel 3.8. NPLs Per Sektor Ekonomi Di Provinsi Riau(juta rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tw I 07		Tw II 07		Tw III 07		Tw IV 07		Tw I 08	
		Jumlah	NPL								
1	Pertanian	3.466.878	5,73%	3.253.308	3,47%	3.125.330	3,60%	3.248.012	3,25%	3.478.170	3,43%
2	Pertambangan	1.305	10,19%	20.129	0,71%	53.557	0,00%	71.996	0,01%	74.860	0,00%
3	Perindustrian	1.740.767	8,34%	1.727.481	1,35%	1.641.003	1,07%	1.585.252	1,01%	1.617.809	2,51%
4	Listrik, Gas dan Air	305	22,30%	443	15,35%	6.427	1,06%	6.422	1,06%	6.283	1,08%
5	Konstruksi	504.644	19,32%	563.100	18,14%	737.319	7,16%	603.843	6,47%	598.228	5,46%
6	Perdag., Resto. & Hotel	2.771.654	5,98%	3.042.450	5,79%	3.256.886	3,67%	3.510.595	3,99%	3.513.244	3,75%
7	Pengangkutan, Pergud.	216.115	2,18%	228.580	5,49%	322.346	3,68%	353.024	0,64%	392.989	0,88%
8	Jasa-jasa Dunia Usaha	889.009	3,88%	959.879	6,21%	986.694	4,88%	1.071.764	3,73%	1.100.477	4,34%
9	Jasa-jasa Sosial Masy.	129.868	11,90%	120.332	12,90%	117.785	12,19%	109.778	10,40%	114.409	10,22%
10	Lain-lain	4.281.890	2,24%	4.652.509	2,54%	5.008.474	2,14%	5.232.863	1,71%	5.619.773	1,92%

Berdasarkan penyebarannya, rasio NPLs tertinggi terdapat pada Kota Dumai, yaitu sebesar 4,76% atau mengalami penurunan kualitas dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,67%, diikuti Kota Pekanbaru dan Kabupaten Indragiri Hulu yang mencapai 3,39% dan 1,91%. Selanjutnya Kabupaten Bengkalis dan Indragiri Hilir masing masing tercatat 1,47% dan 1,01%.

Tabel 3.9. NPLs Berdasarkan Kota/Kabupaten di Provinsi Riau

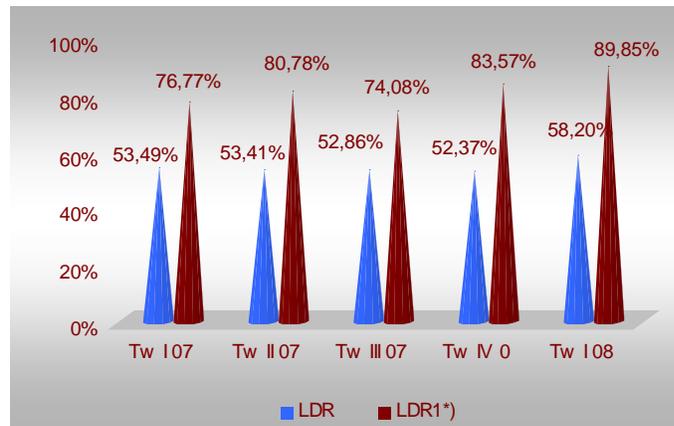
No.	Kab./Kota	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07	Tw IV 07	Tw I 08
1	Pekanbaru	4,52%	4,80%	3,58%	3,22%	3,39%
2	Dumai	5,79%	2,14%	2,43%	4,67%	4,76%
3	Bengkalis	1,36%	6,31%	5,44%	1,47%	1,47%
4	Indragiri Hulu	2,17%	0,85%	0,64%	1,84%	1,91%
5	Indragiri Hilir	29,98%	1,88%	1,69%	0,57%	1,01%
6	Lainnya	1,03%	2,78%	1,36%	0,86%	27,68%

3.1.4. Intermediasi Perbankan

3.1.4.1. Perkembangan LDR

Pada triwulan laporan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp.28,38 triliun, menurun sebesar Rp.1,78 triliun (5,90%). Berdasarkan kepemilikan penurunan terbesar terjadi pada dana milik perusahaan swasta yaitu 26,12%, diikuti dana milik perorangan sebesar 3,09%, dana milik pemerintah daerah sebesar 0,99%. Penurunan DPK dan peningkatan penyaluran kredit oleh perbankan pada periode laporan menyebabkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan Riau mencapai 58,20%, meningkat baik dibandingkan dengan periode sebelumnya maupun periode yang sama tahun sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 52,37% dan 53,49%. Sementara itu, dengan memperhitungkan kredit berdasarkan lokasi proyek LDR perbankan mencapai 89,85%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 83,57% maupun periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 76,77%. Hal ini menunjukkan bahwa secara total LDR perbankan di Provinsi Riau lebih tinggi dibandingkan dengan LDR perbankan nasional.

Grafik 3.6. Perkembangan LDR Di Provinsi Riau



Ket : LDR1 = rasio kredit berdasarkan lokasi proyek terhadap DPK
 *) data sampai dengan Februari 2008

3.1.4.2. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM

Penyaluran kredit perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terus menunjukkan peningkatan. Pada triwulan laporan kredit kepada UMKM mencapai Rp.11,76 triliun, meningkat 5,40% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit secara keseluruhan pada triwulan laporan sebesar 4,58%. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit perbankan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dari 70,63% menjadi 71,18%. Kondisi ini merupakan gambaran besarnya kepedulian perbankan di Riau dalam mendukung upaya pengembangan UMKM.

Tabel 3.10. Perkembangan Kredit UMKM di Provinsi Riau (juta rupiah)

Plafon	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07	Tw IV 07	Tw I 08
Kredit Mikro (Rp.0 - 50 jt)	3.417.303	3.713.768	3.845.283	3.875.958	3.939.998
Kredit Kecil (Rp.50 jt - Rp. 500 jt)	3.177.459	3.667.609	4.131.516	4.319.310	4.732.353
Kredit Menengah (Rp.500 jt - Rp.5 m)	2.443.806	2.663.453	2.780.622	2.959.626	3.084.392
Kredit Corporate (> Rp.5 m)	4.963.867	4.523.381	4.498.400	4.638.655	4.759.499
Total Kredit	14.002.435	14.568.211	15.255.821	15.793.549	16.516.242
Total Kredit UMKM	9.038.568	10.044.830	10.757.421	11.154.894	11.756.743
(% terhadap Total Kredit)	64,55%	68,95%	70,51%	70,63%	71,18%

Menurut jenis penggunaan, sebesar Rp.6,15 triliun atau 52,30% dari total penyaluran kredit kepada UMKM digunakan untuk sektor produktif (kredit modal kerja dan investasi) dan sisanya untuk kredit konsumsi. Hal ini memberikan indikasi

positif bagi pengembangan beberapa sektor ekonomi yang banyak dilakukan oleh UMKM seperti perdagangan dan pertanian.

Tabel 3.11. Sebaran Kredit UMKM menurut Jenis Penggunaan (juta rupiah)

Jenis Penggunaan	Tw I 07		Tw II 07		Tw III 07		Tw IV 07		Tw I 08	
	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%
1. Modal Kerja	3.174.575	35,12	3.495.440	34,80	3.733.555	34,71	3818914,00	34,24	3.935.260	33,47
2. Investasi	1.603.132	17,74	1.918.314	19,10	2.031.824	18,89	2120158,00	19,01	2.213.429	18,83
3. Konsumsi	4.260.861	47,14	4.631.076	46,10	4.992.042	46,41	5215822,00	46,76	5.608.054	47,70
Jumlah	9.038.568	100	10.044.830	100	10.757.421	100	11.154.894	100	11.756.743	100

Berdasarkan sektor ekonomi, sektor perdagangan mempunyai pangsa terbesar yaitu mencapai 24,80%, diikuti sektor pertanian sebesar 13,32%, sektor jasa dunia usaha 7,11%, sektor konstruksi 3,04%, pengangkutan 1,74%, perindustrian 1,53%, jasa sosial masyarakat 0,35%, pertambangan 0,21%, dan listrik 0,05%, sementara sektor lain-lain mencapai 47,85%.

Tabel 3.12. Sebaran Kredit UMKM menurut Sektor Ekonomi (juta rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tw I 07		Tw II 07		Tw III 07		Tw IV 07		Tw I 08	
		Jumlah	%								
1	Pertanian	966.182	10,69	1.257.009	12,51	1.322.457	12,29	1.387.064	12,43	1.565.807	13,32
2	Pertambangan	1.305	0,01	4.429	0,04	3.825	0,04	25.447	0,23	24.518	0,21
3	Perindustrian	209.643	2,32	219.957	2,19	199.799	1,86	198.119	1,78	180.036	1,53
4	Listrik, Gas dan Air	305	0,00	443	0,00	6.427	0,06	6.422	0,06	6.283	0,05
5	Konstruksi	283.395	3,14	332.702	3,31	481.789	4,48	366.783	3,29	357.315	3,04
6	Perdag., Resto. & Hotel	2.318.826	25,65	2.548.769	25,37	2.711.701	25,21	2.873.064	25,76	2.915.521	24,80
7	Pengangkutan, Pergud.	161.837	1,79	172.371	1,72	180.054	1,67	180.254	1,62	204.111	1,74
8	Jasa-jasa Dunia Usaha	743.087	8,22	799.970	7,96	786.128	7,31	835.992	7,49	836.425	7,11
9	Jasa-jasa Sosial Masy.	41.020	0,45	39.981	0,40	43.206	0,40	43.889	0,39	41.542	0,35
10	Lain-lain	4.312.968	47,72	4.669.199	46,48	5.022.035	46,68	5.237.860	46,96	5.625.185	47,85

Kualitas kredit UMKM mengalami penurunan yang tercermin dari meningkatnya rasio NPLs terhadap total kredit UMKM dari 2,42% menjadi 2,98% pada triwulan laporan. Namun demikian, kualitas tersebut masih dalam target yang aman (dibawah 5%), dan lebih baik dibandingkan dengan kualitas total kredit perbankan di Riau. Kondisi ini dapat menjadi pertimbangan perbankan untuk terus mendukung pengembangan UMKM. Bila dilihat berdasarkan sektor ekonomi, sektor jasa sosial masyarakat mempunyai NPLs tertinggi yang mencapai 13,82%, diikuti perindustrian 11,40%, konstruksi 9,13%, pertanian 3,63%, perdagangan 3,41%, jasa dunia usaha 2,70%, pengangkutan 1,69%, listrik 1,08%, dan sektor pertambangan mempunyai NPLs terendah yaitu sebesar 0,00%.

Tabel 3.13. Sebaran NPLs UMKM Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Riau

No	Sektor Ekonomi	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07	Tw IV 07	Tw I 08
1	Pertanian	4,01%	3,85%	3,66%	2,99%	3,63%
2	Pertambangan	10,19%	3,23%	0,00%	0,02%	0,00%
3	Perindustrian	8,55%	7,43%	5,30%	4,56%	11,40%
4	Listrik, Gas dan Air	22,30%	15,35%	1,06%	1,06%	1,08%
5	Konstruksi	9,22%	9,60%	6,72%	7,12%	9,13%
6	Perdag., Resto. & Hotel	3,67%	4,01%	3,77%	2,82%	3,41%
7	Pengangkutan, Pergud.	2,92%	2,93%	2,75%	1,26%	1,69%
8	Jasa-jasa Dunia Usaha	2,41%	4,52%	2,93%	1,79%	2,70%
9	Jasa-jasa Sosial Masy.	16,30%	16,08%	13,01%	12,55%	13,82%
10	Lain-lain	2,30%	2,61%	2,20%	1,71%	1,93%

Dilihat dari penyebarannya, NPLs UMKM tertinggi dimiliki oleh perbankan di Kota Dumai, yaitu mencapai 5,06%, sedangkan NPLs UMKM terendah dimiliki perbankan di Kabupaten Indragiri Hulu yang sebesar 1,12%, tetapi NPLs pada kabupaten ini mengalami penurunan kualitas dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,00%.

Tabel 3.14. Sebaran NPLs UMKM Menurut Kota/Kabupaten di Provinsi Riau

No.	Kab./Kota	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07	Tw IV 07	Tw I 08
1	Pekanbaru	3,91%	4,02%	3,63%	2,77%	3,46%
3	Bengkalis	1,36%	2,17%	2,44%	1,48%	1,47%
2	Dumai	6,37%	6,79%	5,91%	5,07%	5,06%
5	Indragiri Hilir	1,35%	1,77%	1,28%	1,15%	1,95%
4	Indragiri Hulu	1,04%	0,93%	0,82%	1,00%	1,12%
6	Lainnya	1,03%	2,78%	1,36%	0,86%	1,33%

3.1.5. Kondisi Likuiditas

Dana jangka menengah dan panjang mengalami peningkatan 2,31%, sementara dana jangka pendek menurun 6,16%. Di sisi lain, alat likuid perbankan berupa kas dan SBI mengalami penurunan sebesar 24,92% yang disebabkan oleh penurunan pada komponen SBI dan kas perbankan. Peningkatan dana jangka pendek yang diikuti oleh penurunan jumlah alat likuid perbankan mengindikasikan menurunnya kondisi likuiditas perbankan.

3.1.5.1. Perkembangan dan Struktur Dana Pihak Ketiga (DPK)

Posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam triwulan laporan tercatat sebesar Rp.28,38 triliun, menurun sebesar Rp.1,78 triliun (5,90%) dibanding dengan triwulan

sebelumnya. Penurunan DPK terjadi pada komponen giro dan tabungan yang masing-masing mengalami penurunan sebesar 14,39% dan 2,23%, sementara komponen deposito mengalami peningkatan sebesar 1,45%. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan *maturity* (jatuh tempo), deposito berjangka pendek (s.d.3 bulan) mengalami peningkatan sebesar 1,31%, sedangkan deposito berjangka waktu menengah dan panjang meningkat sebesar 2,31% dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini diperkirakan dipengaruhi oleh relatif lebih tingginya suku bunga deposito dibandingkan dengan giro dan tabungan, serta kepercayaan masyarakat terhadap perbankan masih relatif tinggi. Pangsa DPK jangka pendek terhadap total DPK mencapai 96,57%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 96,85%.

Tabel 3.15. Perkembangan Dana Pihak Ketiga di Provinsi Riau (Miliar Rp)

Keterangan	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07	Tw IV 07*)	Tw I 08
Jangka Pendek						
- Giro	12.166	11.166	11.002	11.693	11.102	9.504
- Tabungan	9.157	8.625	9.124	10.041	12.452	12.174
- Deposito (s.d 3 bln)	5.700	5.796	6.553	6.290	5.653	5.728
Total	27.023	25.586	26.679	28.025	29.207	27.406
Jangka Menengah dan Panjang						
- Deposito 3-6 bln	223	272	312	331	427	432
- Deposito 6-12 bln	234	218	267	333	313	307
- Deposito > 12 bln	167	103	21	170	210	234
Total	625	593	600	834	950	972
Total DPK	27.648	26.179	27.278	28.858	30.157	28.378

Berdasarkan kepemilikan, DPK milik perorangan masih mendominasi dengan pangsa sebesar 61,61% dari total DPK, diikuti milik pemerintah daerah sebesar 21,09%, dan milik perusahaan swasta sebesar 10,70%. Dalam triwulan laporan DPK milik swasta mengalami penurunan tertinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu 26,12%, diikuti milik perorangan 3,09%, dan milik pemerintah daerah 0,99%.

Melihat kondisi di atas, penurunan DPK pada triwulan laporan diperkirakan karena kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta banyak menggunakan *self financing* dan adanya alternatif penanaman dana bagi nasabah perorangan seperti ORI004 yang diterbitkan pemerintah pada bulan Maret 2008, serta terkait dengan awal tahun anggaran untuk dana milik pemerintah daerah.

Tabel 3.16. Sebaran DPK menurut kepemilikan di Provinsi Riau (juta rupiah)

No	Kepemilikan	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07	Tw IV 07	Tw I 08
1	Pemerintah Pusat	146.652	129.184	272.289	248.654	296.225
2	Pemerintah Daerah	8.717.756	8.775.944	9.086.932	6.044.086	5.984.242
3	Badan/ Lembaga Pemerintah	262.742	106.510	92.139	50.218	44.950
4	Badan Usaha Milik Negara	188.739	294.488	271.817	349.652	381.926
5	Badan Usaha Milik Daerah	14.738	45.737	63.420	95.895	98.101
6	Perusahaan Asuransi	215.061	255.689	219.239	193.044	179.733
7	Perusahaan Swasta	2.013.415	2.439.163	2.502.019	4.111.863	3.037.840
8	Yayasan dan Badan Sosial	221.694	157.779	153.814	223.809	188.689
9	Koperasi	319.939	181.070	221.489	273.769	290.110
10	Perorangan	13.714.750	14.524.592	15.578.651	18.041.396	17.484.066
11	Lainnya	348.934	355.559	391.575	516.522	386.218
12	Bukan Penduduk	15.067	12.518	4.911	8.306	6.372

Dilihat dari distribusinya, pangsa DPK terbesar masih berada di Kota Pekanbaru yaitu 59,54% dari total DPK, diikuti oleh Bengkalis dan Dumai masing-masing sebesar 10,27% dan 6,55%. Penurunan DPK terjadi pada semua kota/kabupaten. Penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Bengkalis yang turun sebesar 9,54%, sedangkan penurunan terendah terjadi di Kota Pekanbaru yaitu sebesar 3,96%..

Tabel 3.17. Penghimpunan DPK berdasarkan kota/kabupaten di Provinsi Riau

No.	Kab./Kota	Tw I 07		Tw II 07		Tw III 07		Tw IV 07		Tw I 08	
		Rp. Juta	%								
1	Pekanbaru	14.046.210	53,65	15.113.767	55,41	16.171.331	56,04	17.593.833	58,34	16.897.283	59,54
3	Bengkalis	2.911.756	11,12	3.029.624	11,11	3.117.676	10,80	3.223.053	10,69	2.915.429	10,27
2	Dumai	1.656.496	6,33	1.715.305	6,29	1.848.436	6,41	1.996.298	6,62	1.860.023	6,55
5	Indragiri Hilir	872.256	3,33	928.644	3,40	952.058	3,30	929.376	3,08	871.255	3,07
4	Indragiri Hulu	1.067.302	4,08	1.184.178	4,34	1.162.867	4,03	1.307.644	4,34	1.231.723	4,34
6	Lainnya	5.625.467	21,49	5.306.715	19,45	5.605.927	19,43	5.107.010	16,93	4.602.759	16,22
Jumlah		26.179.487	100	27.278.233	100	28.858.295	100	30.157.214	100	28.378.472	100

Dalam triwulan laporan, jumlah rekening DPK bertambah dari 1.650.631 rekening menjadi 1.767.983 rekening (7,11%). Pertumbuhan rekening tertinggi terjadi pada rekening dengan saldo Rp.100 juta sampai dengan Rp.250 juta (18,98%), diikuti rekening dengan saldo Rp.1 juta sampai dengan Rp.10 juta (13,55%). Sementara itu, penurunan jumlah rekening tertinggi terjadi pada rekening dengan saldo Rp.50 juta sampai dengan Rp.100 juta yaitu 57,40%. Seiring dengan menurunnya jumlah rekening pada nominal Rp. 50 juta sampai dengan Rp.100 juta, maka jumlah nominal pada rekening tersebut juga mengalami penurunan tertinggi yaitu sebesar Rp.1.396 miliar (56,15%), sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada nominal Rp.100 juta sampai dengan Rp.250 juta yaitu sebesar Rp.943 miliar (21,49%).

Tabel 3.18. Penghimpunan DPK Berdasarkan Kelompok Nominal di Provinsi Riau

Klasifikasi	Tw I 07		Tw II 07		Tw III 07		Tw IV 07		Tw I 08	
	Jumlah Rekening	Jumlah DPK (Rp)								
< Rp.1 juta	979.642	568.694	915.527	506.584	1.148.579	623.768	1.119.790	656.222	1.198.846	659.459
Rp.1 juta s.d. <Rp.10 juta	203.330	560.285	280.824	721.713	266.026	764.178	235.709	772.498	267.637	855.443
Rp.10 juta s.d. <Rp.50 juta	185.332	4.295.640	182.495	3.897.581	223.133	5.002.633	222.850	5.290.946	247.178	5.636.566
Rp.50 juta s.d. <Rp.100 juta	20.802	1.597.840	22.776	1.713.674	15.689	1.145.769	35.997	2.485.348	15.335	1.089.782
Rp.100 juta s.d. <Rp.250 juta	19.659	3.256.087	22.587	3.845.683	24.840	4.461.835	24.349	4.389.871	28.971	5.333.330
Rp.250 juta s.d. <Rp.1.000 juta	5.992	2.751.411	5.722	2.651.695	6.059	2.794.237	9.233	3.907.441	7.813	3.215.486
Rp.1.000 juta s.d. <Rp.10.000 juta	1.782	4.424.235	2.055	5.310.013	1.997	4.055.260	2.550	5.523.413	2.033	4.428.438
>=Rp.10.000 juta	150	8.715.915	169	8.631.290	193	10.010.615	153	7.131.475	170	7.159.968
Total	1.416.689	26.170.107	1.432.155	27.278.233	1.686.516	28.858.295	1.650.631	30.157.214	1.767.983	28.378.472

3.1.5.2. Rasio Alat Likuid

Jumlah alat likuid (kas dan Sertifikat Bank Indonesia) perbankan Provinsi Riau sebesar Rp.4,90 triliun atau menurun 24,92% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut didominasi oleh penurunan pada komponen SBI (28,85%), yang disebabkan oleh adanya pengalihan dana ke bank lain dalam bentuk antar bank aktiva oleh manajemen bank. Di sisi lain jumlah *Non Core Deposit* (NCD)¹ perbankan Provinsi Riau juga menurun sebesar 6,16% menjadi Rp.8,22 triliun. Penurunan terjadi pada komponen dana yaitu giro dan tabungan yang masing-masing tercatat sebesar 14,93% dan 2,23%, sementara komponen deposito berjangka waktu 1 – 3 bulan meningkat sebesar 1,31%.

Tabel 3.19. Perkembangan Alat Likuid dan *Non Core Deposit*

Alat Likuid	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07	Tw IV 07	Tw I 08
Kas	576.120	671.645	755.539	943.768	928.045
SBI	7.108.831	6.918.178	6.458.342	5.579.668	3.969.965
Jumlah	7.684.951	7.589.823	7.213.881	6.523.436	4.898.010

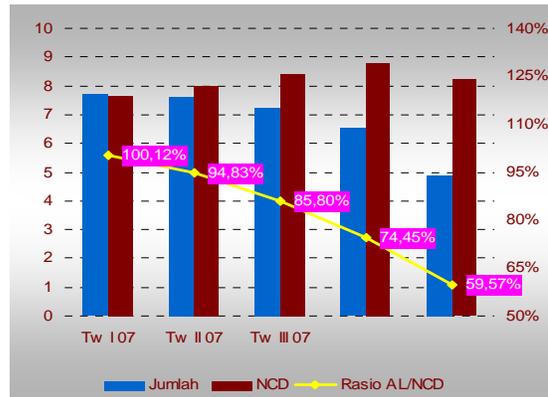
Non Core Deposit (NCD)	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07	Tw IV 07	Tw I 08
Giro (30%)	3.349.662	3.300.474	3.507.990	3.330.537	2.851.325
Tabungan (30%)	2.587.577	2.737.340	3.012.296	3.735.506	3.652.294
Dep 1-3 bln (30%)	1.738.700	1.965.795	1.887.100	1.695.982	1.718.270
NCD	7.675.939	8.003.609	8.407.387	8.762.025	8.221.888

Dengan perkembangan tersebut maka rasio Alat Likuid terhadap NCD mengalami penurunan dari 74,45% menjadi 59,57%, yang mengindikasikan turunnya kondisi likuiditas perbankan di Provinsi Riau. Sepanjang tahun 2006, rasio ini terus menunjukkan peningkatan, namun mengalami penurunan sejak awal triwulan

¹ Non Core Deposit merupakan dana masyarakat yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Diasumsikan terdiri dari 30% giro, 30% tabungan dan 30% deposito berjangka waktu 1-3 bulan.

2007 sampai dengan triwulan I – 2008. Hal ini terjadi karena pertumbuhan NCD lebih tinggi dari pada pertumbuhan alat likuid.

Grafik 3.7. Perkembangan Rasio Alat Likuid terhadap *Non Core Deposit*



3.1.6. Profitabilitas

Kondisi profitabilitas perbankan Provinsi Riau pada triwulan laporan masih terus menunjukkan peningkatan. Penurunan suku bunga kredit yang diimbangi juga dengan penurunan suku bunga dana membuat perbankan tetap dapat memperoleh profit. Margin yang diperoleh oleh perbankan mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya.

3.1.6.1. Spread Bunga

Selama triwulan laporan, Bank Indonesia memutuskan untuk tetap mempertahankan BI Rate pada tingkat 8,00%. Perkembangan ekonomi global yang kurang kondusif, perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional selama triwulan I – 2008, serta tekanan inflasi yang lebih tinggi akibat meningkatnya harga komoditas internasional menjadi alasan bagi Bank Indonesia untuk tetap mempertahankan tingkat BI - Rate.

Kalangan perbankan merespon kebijakan ini dengan tetap menurunkan suku bunga deposito (*weighted average*) sebesar 26 bps, dari 7,23% pada akhir Tw IV-2007 menjadi 6,97% pada Tw I – 2008. Sedangkan suku bunga kredit (*weighted average*) turun sebesar 13 bps dari 13,62% pada akhir Tw IV – 2007 menjadi

13,49% pada Tw I – 2008. Dengan demikian *spread* yang dinikmati perbankan pada triwulan laporan tercatat sebesar 6,52%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan *spread* pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,39%.

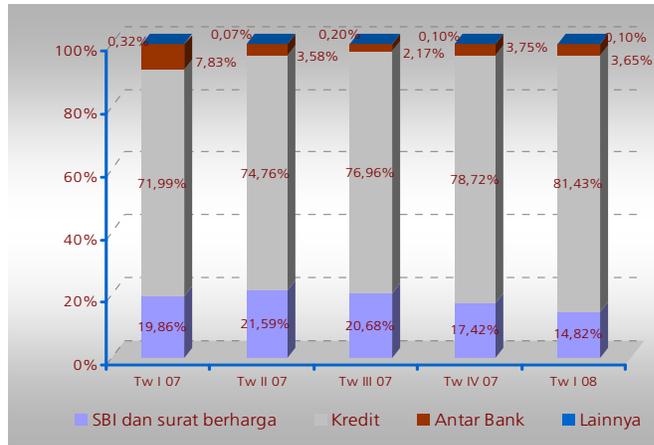
Grafik 3.8. Perkembangan Suku Bunga Rata-rata Tertimbang Kredit dan Deposito



3.1.6.2. Komposisi Pendapatan Bunga dan Beban Bunga

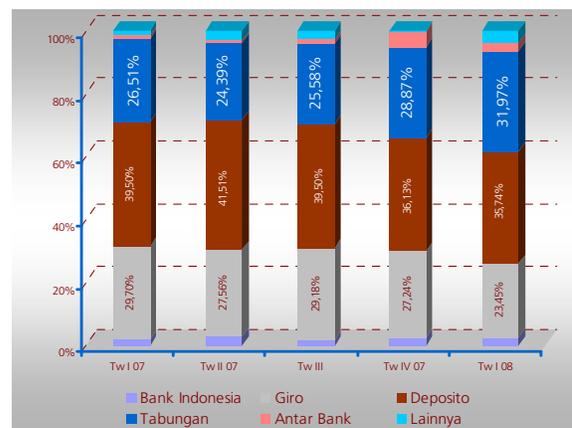
Selama triwulan laporan, perbankan Provinsi Riau mencatat pendapatan bunga sebesar Rp.664 miliar. Pangsa terbesar berasal dari pendapatan bunga kredit yang mencapai 81,43%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini seiring dengan meningkatnya penyaluran kredit oleh perbankan dan meningkatnya margin yang dinikmati oleh perbankan. Selanjutnya pendapatan bunga dari SBI dan surat-surat berharga sebesar 14,82%, mengalami penurunan bila dibandingkan triwulan sebelumnya, karena menurunnya penanaman dalam bentuk SBI oleh perbankan Riau.

Grafik 3.9. Komposisi Pendapatan Bunga



Di sisi lain, beban bunga yang dikeluarkan perbankan selama triwulan laporan, tercatat sebesar Rp.323 miliar. Pembayaran bunga untuk dana pihak ketiga mencapai 91,15% dari total pembayaran bunga, menurun bila dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 92,24%. Penurunan beban bunga seiring dengan semakin menurunnya jumlah dana yang dihimpun dan suku bunga dana yang diterapkan oleh perbankan.

Grafik 3.10. Komposisi Beban Bunga

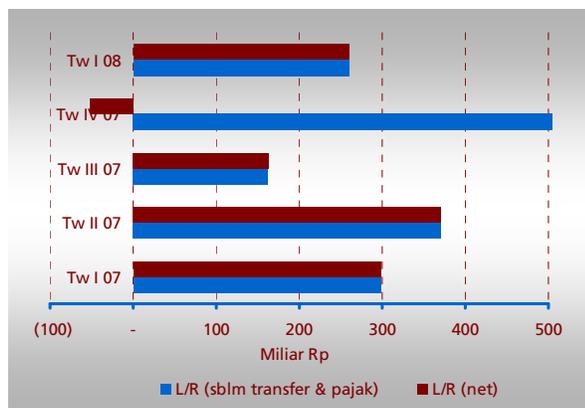


Seiring dengan penurunan beban bunga dana pihak ketiga dan peningkatan penyaluran kredit oleh bank, maka *Net Interest Income* (NII) perbankan Provinsi Riau pada triwulan laporan juga mencapai Rp. 341 miliar, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp.351 miliar.

3.1.6.3. Perkembangan Laba Rugi

Selama triwulan laporan perbankan Riau mencatat perolehan laba sebesar Rp.260 miliar. Perolehan laba didominasi oleh adanya peningkatan penyaluran kredit sehingga pendapatan operasional yang didominasi oleh kredit juga mengalami peningkatan. Sementara itu di sisi lain, turunnya beban operasional karena penurunan jumlah dan suku bunga dana juga menjadi pendorong perolehan laba selama triwulan laporan.

Grifik 3.11. Perkembangan Laba Rugi (Triwulanan)



3.2. Bank Perkreditan Rakyat

Secara umum kegiatan usaha BPR pada triwulan laporan menunjukkan perkembangan yang relatif baik dibanding dengan triwulan sebelumnya baik dari jumlah aset, DPK, dan kredit yang disalurkan. Membaiknya kondisi perekonomian di Provinsi Riau, mendorong pertumbuhan kantor Bank Perkreditan Rakyat yang saat ini sedang diproses ijin sebanyak 7 BPR sehingga sampai akhir tahun 2008 jumlah BPR diperkirakan mencapai 28 bank. Aset BPR mengalami peningkatan sebesar 8,15% sehingga menjadi Rp.444 miliar, yang didorong oleh peningkatan pada Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga meningkat menjadi Rp.327 miliar atau sebesar 6,88% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan laporan kredit tumbuh 13,04% dari Rp.230 miliar menjadi Rp.260 miliar. Peningkatan jumlah kredit yang disalurkan diikuti oleh peningkatan kualitas kredit BPR/S yang ditunjukkan oleh menurunnya rasio NPLs terhadap total kredit dari 6,09% menjadi 5,89%. Pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan

dengan pertumbuhan DPK, menyebabkan LDR BPR meningkat dari 75,22% menjadi 79,56%.

Tabel 3.20. Perkembangan Usaha BPR/BPRS
Di Provinsi Riau (juta rupiah)

Keterangan	Periode				
	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07	Tw IV 07	Tw I 08
1. Jumlah BPR/S	15	16	19	21	21
2. Asset	300.156	319.085	390.270	410.785	444.260
3. DPK	201.194	211.863	264.562	305.889	326.933
4. Kredit	184.462	199.303	211.992	230.084	260.097
5. NPL (nominal)	14.620	16.914	15.587	14.014	15.307
LDR (%)	91,68	94,07	80,13	75,22	79,56
NPLs (%)	7,93	8,49	7,35	6,09	5,89

Namun, bila dilihat dari beberapa indikator, kinerja BPR di Provinsi Riau pada triwulan laporan mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, BPR dengan CAR \geq 20% berkurang 2 BPR, sementara itu BPR dengan ROA > 5 bertambah 1 BPR menjadi 5 BPR seiring dengan bertambahnya jumlah BPR di Provinsi Riau.

Tabel 3.21. Indikator Kinerja Utama BPR/BPRS
Di Provinsi Riau

Keterangan	Jumlah BPR/BPRS				
	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07	Tw IV 06	Tw I 07
1. CAR (%)					
a. 1 s.d. < 10	0	0	0	0	0
b. 10 s.d. < 20	2	2	4	4	7
c. \geq 20	13	13	14	16	14
2. ROA (%)					
a. < 1	5	4	6	5	5
b. 1 - 5	6	7	7	11	11
c. > 5	4	4	5	4	5

3.3. Bank Syariah

Kegiatan perbankan Syariah pada triwulan laporan tetap menunjukkan perkembangan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, meskipun terjadi penurunan pada aset Syariah karena menurunnya dana pihak ketiga yang dihimpun. Pada triwulan laporan terjadi penambahan 2 (dua) Unit Usaha Syariah (UUS), sehingga secara kelembagaan terdapat 7 (tujuh) bank, yang terdiri dari 2 (dua) Bank Syariah dan 5 (lima) Unit Usaha Syariah (UUS)

Tabel 3.22. Indikator Kinerja Utama Bank Syariah di Provinsi Riau (juta rupiah)

No.	Keterangan	Periode				
		Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07	Tw IV 06	Tw I 07
1	Jumlah Bank	5	5	5	5	7
2	Asset	701.639	790.394	863.588	947.849	943.650
3	DPK	449.626	500.181	536.943	769.774	746.294
4	Pembiayaan	468.128	553.247	678.113	683.372	730.331
5	Nominal NPF	24.274	22.989	23.212	13.717	15.022
6	NPF	5,19%	4,16%	3,42%	2,01%	2,06%
7	FDR	104,11%	110,61%	126,29%	88,78%	97,86%

Bank Syariah dan UUS

Total aset perbankan syariah pada triwulan laporan menurun 0,44% menjadi Rp.944 miliar. Penurunan aset ini disebabkan oleh adanya penurunan dana pihak ketiga yang mencapai 3,05% menjadi Rp.746 miliar. Sementara itu, pembiayaan tumbuh 6,87% menjadi Rp.730 miliar. Seperti halnya Bank Perkreditan Rakyat, pertumbuhan pembiayaan yang lebih tinggi dari pertumbuhan dana berdampak pada peningkatan FDR syariah dari 88,78% menjadi 97,86%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan rasio LDR pada bank konvensional maupun BPR.

Dilihat dari sektor yang dibiayai sebesar 39,94% pembiayaan diberikan kepada sektor jasa terutama jasa dunia usaha, 18,32% untuk sektor lainnya (konsumsi), 15,86% kepada sektor pertanian dan 10,96% untuk sektor pengangkutan (pengangkutan, pergudangan dan komunikasi) dan 9,20% diserap oleh sektor konstruksi. Kualitas pembiayaan pada akhir triwulan laporan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kualitas pembiayaan pada triwulan sebelumnya, yang terlihat dari peningkatan rasio *Non Performing Financing* (NPFs) terhadap total pembiayaan dari 2,01% menjadi 2,06%.

Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk usia kerja yang bekerja pada tahun 2007. Penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada perluasan dan penciptaan lapangan kerja menjadi pendorong dalam mengurangi angka pengangguran. Namun di sisi lain, jumlah setengah penganggur sukarela⁴ mengalami peningkatan sebesar 8,27% dibanding periode sebelumnya yaitu 360 ribu jiwa.

Tabel 4.1. Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Utama (Jiwa)

Kegiatan Utama yang Menggunakan Waktu Terbanyak		Agust-06	Agust-07
Angkatan Kerja	Bekerja	1.773.277	1.907.946
	Pengangguran	202.387	207.138
	Total	1.975.664	2.115.084
Bukan Angkatan Kerja	Sekolah	362.355	360.855
	Mengurus RT	870.383	793.503
	Lainnya	104.025	114.247
	Total	1.336.763	1.268.605
Total Penduduk 15+		3.312.427	3.383.689
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		59,64%	62,51%
Tingkat PengangguranTerbuka (TPT)		10,24%	9,79%
Setengah Penganggur Terpaksa		365.810	338.595
Setengah Penganggur Sukarela		332.467	359.959
Total		698.277	698.554

sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Pangsa terbesar dari jumlah penduduk usia kerja yang bekerja pada tahun 2007 bekerja pada sektor pertanian (48,82%), diikuti sektor perdagangan (17,48%), industri (6,47%), angkutan & perdagangan (5,82%), bangunan (5,14%), dan sektor listrik, gas & air memiliki pangsa terendah (0,22%). Namun sektor listrik, gas & air mengalami peningkatan tertinggi dibanding periode sebelumnya yang mencapai 152,75% menjadi sebesar 4,3 ribu orang. Sementara peningkatan terendah terjadi pada sektor bangunan (0,39%) menjadi sebesar 98 ribu orang. Namun sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 4,72% dibandingkan periode sebelumnya menjadi 931 ribu jiwa. Penurunan pada sektor pertanian ini diperkirakan karena pengaruh musim panen yang cenderung bergeser dan tidak merata, sehingga menyebabkan beralihnya penduduk untuk bekerja pada sektor lain yang lebih menjanjikan seperti sektor industri dan listrik, yang pada tahun 2007 mengalami peningkatan..

⁴ Penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam/minggu yang tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain

Tabel 4.2. Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama (Jiwa)

Lapangan Pekerjaan Utama	Agust-06		Agust-07	
	Jiwa	%	Jiwa	%
Pertanian	977.638	55,13	931.467	48,82
Pertambangan	37.511	2,12	42.079	2,21
Industri	94.859	5,35	123.387	6,47
Listrik, Gas & Air	1.691	0,10	4.274	0,22
Bangunan	97.684	5,51	98.067	5,14
Perdagangan	277.579	15,65	333.551	17,48
Angkutan & Perdagangan	99.152	5,59	111.063	5,82
Keuangan & Jasa Perusahaan	14.438	0,81	16.141	0,85
Jasa Kemasyarakatan	172.725	9,74	247.917	12,99
Total	1.773.277	100,00	1.907.946	100,00

sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Dari jumlah tersebut, yang bekerja sebagai buruh/karyawan tercatat sebesar 37,34% mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, berusaha sendiri 25,35%, pekerja tidak dibayar 13,35%, dan pangsa paling rendah adalah pekerja bebas non petani yang mencapai 2,01%. Dari jumlah tersebut penduduk yang bekerja sebagai pekerja bebas pertanian mengalami peningkatan tertinggi yang mencapai 44,26%, sementara pekerja bebas non petani mengalami peningkatan paling rendah yaitu sebesar 7,11%. Di sisi lain, penduduk yang berusaha sendiri mengalami penurunan jumlah (17,87%) menjadi sebesar 484 ribu jiwa.

Tabel 4.3. Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (Jiwa)

Status Pekerjaan Utama	Agust-06		Agust-07	
	Jiwa	%	Jiwa	%
Berusaha Sendiri	588.716	33,20	483.570	25,35
Berusaha Dibantu Buruh Tdk Tetap/Buruh Tdk Dibayar	219.212	12,36	240.964	12,63
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	56.831	3,20	72.494	3,80
Buruh/Karyawan	617.669	34,83	712.378	37,34
Pekerja Bebas Pertanian	73.125	4,12	105.492	5,53
Pekerja bebas Non Petani	35.856	2,02	38.405	2,01
Pekerja Tdk Dibayar	181.868	10,26	254.643	13,35
Total	1.773.277	100,00	1.907.946	100,00

sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

3. Tingkat Pendidikan Daerah

Jumlah penduduk Provinsi Riau yang buta huruf pada periode laporan cenderung mengalami penurunan. Persentase penduduk pada kelompok umur 10 tahun ke atas yang buta huruf pada tahun 2007 mengalami penurunan dari 2,46% menjadi 2,42% dibandingkan dengan tahun 2006. Sementara persentase penduduk dengan kategori buta huruf usia dewasa (15 tahun ke atas) tercatat sebesar 2,67%, juga menurun jika dibandingkan dengan tahun 2004 yang mencapai 3,59%. Angka tersebut telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan oleh Depdiknas, yang tercantum dalam rencana startegis Depdiknas yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu menurunkan angka buta huruf usia 15 tahun ke atas hingga 5% pada tahun 2009.

Tabel 4.4. Persentase Penduduk Buta Huruf di Provinsi Riau

No.	Umur	Tahun			
		2004	2005	2006	2007
1	10 Tahun Ke Atas	3,20	1,96	2,46	2,42
2	15 Tahun Ke Atas	3,59	2,24	2,76	2,67

sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Berdasarkan angka partisipasi penduduk sekolah, maka terjadi peningkatan hampir pada semua kelompok umur, kecuali kelompok umur 13 – 15 tahun yang menurun dari 91,15% menjadi 91,11%. Peningkatan tertinggi terjadi pada kelompok umur 16 – 18 tahun dari 62,87% menjadi 63,64%. Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan persentase penduduk yang mempunyai akses terhadap dunia pendidikan. Angka ini juga dipengaruhi oleh jumlah sarana dan prasarana, peran pemerintah terhadap pendidikan, serta partisipasi penduduk terhadap pendidikan. Peningkatan jumlah Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, semakin baiknya sarana dan prasarana dunia pendidikan, dan peran pemerintah terhadap keberlangsungan tingkat pendidikan.

Namun di sisi lain, masih terdapat sekitar 2,08% dan 8,89% penduduk usia 7 – 12 tahun dan usia 13 – 15 tahun yang belum berpartisipasi terhadap pendidikan. Angka ini menggambarkan bahwa untuk pencapaian program pendidikan dasar 9 tahun

yang dicanangkan pemerintah belum dapat terwujud. Kualitas sumber daya manusia pada suatu masyarakat salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduknya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka kualitas sumber daya manusia akan semakin baik.

Tabel 4.5. Angka Partisipasi Penduduk Sekolah Provinsi Riau

No.	Umur	Tahun			
		2004	2005	2006	2007
1	7 - 12 Tahun	97,27	98,27	97,68	97,92
2	13 - 15 Tahun	89,29	90,64	91,15	91,11
3	16 - 18 Tahun	60,03	62,39	62,87	63,64
4	19 - 24 Tahun	10,20	12,61	12,33	12,51

sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

4. Kesejahteraan Daerah

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Riau bulan Maret 2007 sebesar 574.500 jiwa atau 11,20% dari jumlah penduduk Riau, menurun dibandingkan dengan penduduk miskin pada Juli 2005 yang berjumlah 600.400 jiwa atau 12,51% dari jumlah penduduk Riau. Tingkat kemiskinan di Riau memperlihatkan kecenderungan menurun pada periode 2002 sampai dengan 2007. Pada tahun 2002 persentase penduduk miskin di Riau sebesar 15,39% (635.000 jiwa), tahun 2003 sebesar 14,97% (660.700 jiwa), tahun 2004 sebesar 14,67% (658.600 jiwa), tahun 2005 sebesar 12,51% (600.400 jiwa), dan 2007 sebesar 574.500 jiwa (11,20%). Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2007, penduduk miskin di Riau sebagian besar berada di daerah perdesaan (12,90%), sedang di perkotaan sebesar 9,53%.

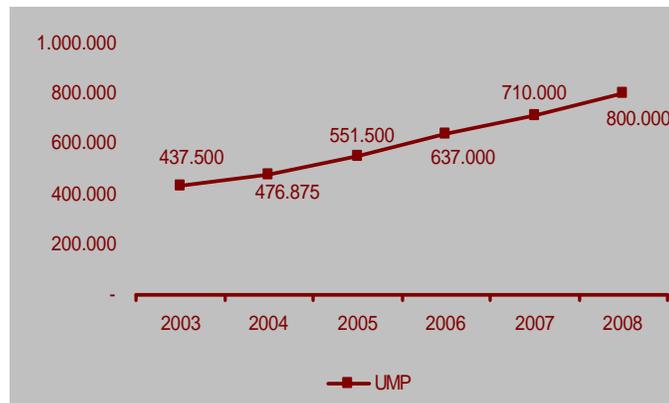
Tabel 4.6. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
1	2001	491.600	10,26
2	2002	635.000	15,39
3	2003	660.700	14,97
4	2004	658.600	14,67
5	2005 (Juli)	600.400	12,51
6	2007 (Maret)	574.500	11,20

sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Berdasarkan Keputusan Gubernur No.38 tahun 2007 terjadi peningkatan Upah Minimum Propinsi (UMP) Riau dari Rp710.000,-/bulan menjadi Rp800.000,-/bulan atau meningkat 12,68%. Peningkatan UMP ini cukup dibandingkan dengan beberapa daerah tetangga seperti Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Jambi yang UMP nya masing-masing tumbuh 3,48%, 10,34% dan 10,03%. Namun demikian, secara jumlah nominal UMP Kepulauan Riau lebih tinggi dibandingkan Provinsi Riau, yang mencapai Rp.833.000,- sementara Jambi tercatat mengalami UMP yang paling rendah diantara keempat daerah dimaksud, yaitu Rp.724.000,-.

Grafik. 4.1. Perkembangan Upah di Provinsi Riau



Berdasarkan Survey Ekspektasi Konsumen (SEK) triwulan I tahun 2008 yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, terjadi penurunan ekspektasi konsumen mengenai peningkatan penghasilan sampai dengan 1 tahun ke depan. Naiknya harga beberapa bahan makanan serta penurunan omzet usaha akibat dari kenaikan harga bahan baku menjadi alasan utama konsumen pesimis terhadap peningkatan penghasilan sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan.

Sementara itu, ekspektasi konsumen terhadap tingkat pengangguran juga menunjukkan penurunan yang artinya masyarakat kurang yakin bahwa pemerintah mampu menurunkan tingkat pengangguran sampai dengan periode 1 tahun ke depan, dengan kondisi ekonomi saat ini.

77,39 % dari uang yang masuk ke Bank Indonesia. Selain itu, dalam rangka menjaga kualitas uang dan memenuhi kebutuhan uang pecahan kecil di masyarakat, Kantor Bank Indonesia Pekanbaru secara rutin melakukan kegiatan penukaran uang, yaitu : (i) pelayanan penukaran uang lusuh atau rusak yang diselenggarakan pada setiap hari Selasa; (ii) pelayanan penukaran uang pecahan kecil yang dilaksanakan setiap hari yaitu hari Senin - Kamis; dan (iii) kegiatan kas keliling atau pelayanan kas yang dilakukan di luar Kantor Bank Indonesia baik di kota Pekanbaru maupun di luar kota Pekanbaru. Pada triwulan laporan telah dilaksanakan kegiatan kas keliling di luar kantor yaitu di Pekanbaru, Bagansiapiapi, Dumai, Rengat dan tembilahan, dengan jumlah penukaran mencapai Rp2,75 miliar. Sementara itu pada triwulan laporan kegiatan penukaran yang dilakukan di Kantor Bank Indonesia Pekanbaru mencapai Rp31,93 miliar.

2.3. Uang Palsu

Jumlah uang palsu yang ditemukan Bank Indonesia Pekanbaru dari setoran bank umum pada triwulan laporan sebanyak 18 lembar, atau 0,0001% dari jumlah lembar uang kertas yang masuk (*inflow*) ke Bank Indonesia. Hal ini berarti dalam setiap 1 juta lembar uang yang masuk terdapat 1 lembar uang palsu. Kondisi tersebut relatif sama dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Untuk mencegah peredaran uang palsu, KBI Pekanbaru terus melakukan berbagai upaya, antara lain dengan melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah secara langsung kepada masyarakat.

3. Perkembangan Alat Pembayaran Non Tunai

3.1. Kliring

Aktivitas transaksi pembayaran non tunai melalui sistem kliring pada triwulan laporan baik dari sisi warkat maupun nominal mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jumlah warkat mencapai 239.981 lembar atau naik 1,56% dan jumlah nominal mencapai Rp5.299,06 miliar atau naik sebesar 2,37% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dalam satu tahun terakhir perkembangan kliring di Provinsi Riau menunjukkan trend meningkat. Sementara itu, persentase penolakan cek/bilyet giro kosong per hari pada triwulan laporan berdasarkan warkat sebesar 0,85% dan nominal sebesar 0,82%, atau berada pada batas yang wajar.

Tabel 5.1. Perkembangan Kliring di Provinsi Riau (juta Rp)

Keterangan	Jumlah Warkat		Jumlah Harian		Tolakan Harian	
	Lembar (satuan)	Nominal (juta Rp)	Lembar (satuan)	Nominal (juta Rp)	Lembar (%)	Nominal (%)
Tw.I 07	234,908	4,572,287	3,670	71,442	0.71	0.60
Tw.II 07	235,998	4,562,529	3,806	73,589	0.65	0.52
Tw.III 07	251,711	5,019,948	3,933	78,437	0.79	0.77
Tw.IV 07	236,299	5,176,172	3,692	80,878	0.86	0.81
Tw.I 08	239,981	5,299,056	4,067	89,815	0.85	0.82

3.2. Transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS)

Transaksi melalui Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS) pada triwulan laporan baik transfer masuk maupun transfer keluar menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan periode yang sama tahun sebelumnya. Total transfer masuk melalui sistem BI RTGS secara nominal sebesar Rp46.580,84 miliar atau turun 20,49%, sedangkan total transfer keluar sebesar Rp25.729,54 miliar atau turun 21,43% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun demikian pada triwulan laporan masih terjadi net incoming transfer transaksi RTGS sebesar Rp20.851,30 miliar. Penurunan transfer masuk dan keluar melalui BI RTGS diperkirakan hanya bersifat sementara dan terkait dengan penurunan kegiatan ekonomi pada triwulan I 2008.

Tabel 5.2. Perkembangan Transaksi RTGS (Miliar Rp)

Keterangan	Kumulatif Triwulanan		Rata-rata Harian	
	Dari	Ke	Dari	Ke
Tw.I 07	45,252.09	70,619.40	707.06	1,103.43
Trw.II 07	22,489.45	45,146.64	362.73	728.17
Trw.III 07	26,203.53	52,671.98	409.43	823.00
Trw.IV 07	32,749.28	58,587.65	511.71	915.43
Trw.I 08	25,729.54	46,580.84	436.09	789.51

4. Lainnya

4.1. Perkembangan Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing

Jumlah Pedagang Valuta Asing yang beroperasi di Riau pada triwulan laporan tercatat 21 perusahaan. Berdasarkan data dari 21 Pedagang Valuta Asing tersebut, nilai penjualan Uang Kertas Asing (UKA) pada periode laporan mencapai USD 3.237 ribu atau meningkat sebesar USD 40 ribu dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar USD 3.197 ribu. Sementara itu nilai pembelian, pada periode laporan mencapai USD 3.279 ribu naik sebesar USD 35 ribu dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar USD 3.244 ribu. Kenaikan ini disebabkan tingginya permintaan masyarakat terhadap valuta asing untuk kegiatan umroh, rekreasi dan berobat ke luar negeri.

Tabel 5.3. Perkembangan Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing (ribu USD)

Keterangan	Pembelian USD	Penjualan USD
Tw I 07	3,172	3,196
Tw II 07	3,216	3,241
Tw III 07	3,227	3,243
Tw IV 07	3,244	3,197
Tw I 08	3,279	3,237

ekonomi pada triwulan depan. Kendala realisasi keuangan pemerintah dapat menghambat pembangunan fisik dan perbaikan jalan yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan distribusi dan dapat mengurangi minat penanaman modal baik dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA) di Riau.

Inflasi

- Inflasi yang cukup tinggi pada triwulan laporan diperkirakan masih akan mengalami tekanan pada triwulan II-2008, yang didominasi oleh tekanan dari sisi biaya akibat tingginya harga komoditas internasional (*imported inflation*). Apalagi tingkat ketergantungan kita terhadap komoditi internasional cukup besar terutama untuk barang modal dan bahan baku penolong. Selain itu, kenaikan harga minyak dunia diperkirakan akan menyebabkan kenaikan harga minyak dalam negeri, yang dapat memicu meningkatnya inflasi pada kelompok *administired price*. Kenaikan harga minyak pada akhirnya akan berdampak pula pada kenaikan harga-harga lainnya, karena adanya peningkatan biaya produksi. Untuk itu, perlu dilakukan langkah antisipatif untuk menjaga kestabilan harga kelompok *volatile food* dan *administered price* seperti harga listrik dan BBM. Potensi tekanan inflasi di triwulan II-2008 dapat terjadi mengingat adanya aksi spekulasi, kendala distribusi barang dan persiapan Pilkada.

Selama tahun 2007 inflasi relatif stabil, namun akan mengalami peningkatan pada tahun 2008

Perbankan

Pada triwulan II-2008 perbankan diperkirakan akan terus berkembang

- Dari sisi perbankan, kondisi ekonomi di Riau diperkirakan terus berkembang yang ditandai dengan semakin turunnya tingkat suku bunga kredit. Kondisi tersebut akan mendorong penyerapan kredit yang lebih besar dan meningkatkan peran intermediasi perbankan.

- Dari sisi jaringan, Jumlah bank umum yang beroperasi di Provinsi Riau hingga akhir triwulan laporan tercatat 38 bank, bertambah 3 bank yaitu Bank Mayapada, Bank Permata Syariah, dan Bank BTN Syariah. Sedangkan jumlah jaringan kantor menjadi sebanyak 338 kantor. Diperkirakan perluasan jaringan kantor bank umum di provinsi Riau masih akan berlanjut, termasuk kemungkinan masuknya bank-bank asing atau campuran. Pelaksanaan otonomi daerah yang semakin matang, dan perkembangan ekonomi di kota/kabupaten yang cukup pesat merupakan insentif bagi bank-bank untuk membuka jaringan kantornya.

Peranan Perbankan Syariah pada triwulan II-2008 diperkirakan

- Berdasarkan penyaluran kredit dan pembiayaan oleh perbankan di triwulan I-2008, terlihat bahwa perbankan Syariah merupakan tulang punggung pendorong ekonomi sektor riil dengan FDR lebih tinggi dari LDR bank umum konvensional. Peranan perbankan Syariah pada triwulan II-2008 diperkirakan akan semakin meningkat mengingat adanya pertumbuhan jaringan kantor sejalan dengan upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan baik oleh Bank Indonesia, perbankan, maupun dukungan dari stakeholder lainnya.

Dengan berbagai upaya yang akan dilakukan diperkirakan peranan perbankan dalam pengembangan UMKM akan meningkat

- Peranan perbankan dalam mendukung pemberdayaan sektor riil dan UMKM, diperkirakan akan terus meningkat. Upaya-upaya yang akan dilakukan antara lain ;(1) mengoptimalkan peran KKMB, (2) merealisasikan kerjasama dengan dinas/instansi terkait seperti Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Peternakan, (3) melakukan program klastering di sektor perikanan, dan (4) melakukan pemetaan UMKM di provinsi Riau.

- Upaya Bank Indonesia Pekanbaru dalam meningkatkan peran intermediasi perbankan dan mendorong aktivitas di sektor riil antara lain dengan (1). Mendorong penguatan skala usaha masyarakat melalui peningkatan jumlah bank umum syariah dan pendirian BPR dan BPRS, (2) Mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan pedesaan melalui pemberdayaan UMKM serta (3) Mendorong peran perbankan dalam pembiayaan baik secara langsung maupun dengan program *channeling*.

TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH

A. INFLASI DAN PDRB

INDIKATOR	2007				2008
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I
MAKRO					
Indek Harga Konsumen :	157,57	155,22	158,20	163,43	170,21
Laju Inflasi Tahunan (yoy%) :	9,42%	6,84%	7,58%	7,53%	8,02%
PDRB - harga konstan (miliar Rp)					
- Pertanian	3.561,98	3.657,73	3.796,72	3.873,13	3.775,50
- Pertambangan & Pengananlian	11.492,09	11.536,76	11.589,67	11.705,25	11.203,72
- Industri Pengolahan	2.205,60	2.219,64	2.317,16	2.358,96	2.348,12
- Listrik, gas dan Air Bersih	44,83	45,57	47,23	47,42	47,27
- Bangunan	621,57	644,63	678,67	687,04	685,70
- Perdagangan, Hotel, dan restoran	1.656,94	1.702,71	1.754,30	1.777,17	1.799,13
- Pengangkutan dan Komunikasi	568,79	579,45	601,00	614,73	624,97
- Keuangan, Persewaan, dan Jasa	234,66	233,94	256,47	272,98	261,81
- Jasa	955,17	967,74	1.017,35	1.048,90	1.040,97
Pertumbuhan PDRB (yoy %, dengan migas)	4,46%	4,29%	4,85%	5,58%	3,29%
Pertumbuhan PDRB (yoy %, tanpa migas)	7,41%	7,24%	8,45%	8,98%	7,81%
Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta)	1.087,70	2.558,14	3.409,46	4.968,86	1.257,43
Volume Ekspor Non Migas (ribu ton)	2.665,21	5.703,09	8.480,77	12.906,03	1.830,88
Nilai Impor Non Migas (USD Juta)	527,21	835,55	1.162,83	1.540,55	320,35
Volume Impor Non Migas (ribu ton)	374,7	855,9	1.142,49	1.602,36	326,15

B. PERBANKAN

INDIKATOR	2007				2008
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I
PERBANKAN					
Bank Umum :					
Total Aset (Rp Triliun)	30,51	31,64	33,33	34,73	32,62
DPK (Rp Triliun)	26,18	27,28	28,86	30,16	28,38
- Giro (Rp Triliun)	11,17	11,00	11,69	11,10	9,50
- Tabungan (Rp Triliun)	8,63	9,12	10,04	12,45	12,17
- Deposito (Rp Triliun)	6,39	7,15	7,12	6,60	6,70
Kredit (Rp Triliun) - berdasarkan lokasi proyek	20,10	22,03	21,39	25,20	25,50
LDR	76,77%	80,78%	74,08%	83,57%	89,85%
Kredit (Rp Triliun) - berdasarkan lokasi kantor cab.	14,00	14,57	15,26	15,79	16,52
- Modal Kerja	4,97	5,08	5,60	5,55	5,26
- Investasi	4,77	4,85	4,66	5,02	5,65
- Konsumsi	4,27	4,64	5,00	5,22	5,61
- LDR	53,49%	53,41%	52,86%	52,37%	58,20%
Kredit UMKM (triliun Rp)					
- Kredit Modal Kerja	3,17	3,50	3,73	3,82	3,94
- Kredit Investasi	1,60	1,92	2,03	2,12	2,21
- Kredit Konsumsi	4,26	4,63	4,99	5,22	5,61
Total kredit UMKM (triliun Rp)	9,04	10,04	10,76	11,15	11,76
NPL MKM Nominal	0,30	0,37	0,34	0,27	0,35
NPL MKM (%)	3,28%	3,67%	3,14%	2,42%	2,98%